

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP Tahun 2025



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

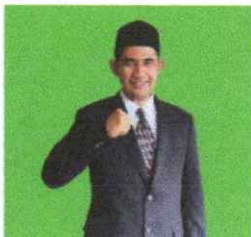


**BANDUNG
LEBIH BEDAS!**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pada umumnya capaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, terutama sasaran yang direncanakan Tahun 2025 dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2025 dan sebagai komitmen DPUTR Kabupaten Bandung untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 ini disusun, dimana merupakan gambaran kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kekurangan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Soreang, 25 Februari 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG



Dr. Ir. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU. ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700308 199703 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung merupakan implementasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung yang dijabarkan dalam program dan kegiatan dinas. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”**.

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang keterkaitan langsung mengemban Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Misi 4, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan”**.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung tersebut, telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator sesuai dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang telah tercapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, sebagai berikut :

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	42,05%	43,48%	103,40%
		Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak	90,92%	90,93%	100,01%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	93,75%	93,77%	100,02%



Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	15,00%	15,00%	100,00%
Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	15,00%	15,00%	100,00%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	62,00%	62,00%	100,00%
Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,09%	85,74%	101,96%
Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	28,57%	28,58%	100,04%
Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	27,00%	27,00%	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja				103,45%

Rata-rata capaian kinerja sebesar 103,45%

Untuk mencapai kinerja tersebut, didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 596.893.208.851,00.** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 553.450.565.177,00.** atau dengan kata lain capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar **92,72%.**

Bila disandingkan antara realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran, maka didapat gambaran sebagai berikut :

Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran
103,45%	:	92,72%

Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014), dengan demikian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara umum dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **103,45%**.

Didalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari faktor internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik masyarakat maupun pegawai, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan.

Hal ini akan menjadi tantangan bagi dinas yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk dapat mencapai target dan realisasi di tahun yang akan datang sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Bandung dan Rencana Strategis Dinas.

Soreang, 25 Februari 2026

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. Ir. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU. ASEAN Eng.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700308 199703 1 005

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii - iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum.....	2
B. Permasalahan Utama dan Isu Strategis.....	8
C. Dasar Hukum.....	9
D. Sistem Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	13
2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	15
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	21
2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	32
B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	74
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Kondisi yang Diharapkan.....	89

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Data Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) DPUTR Kabupaten Bandung.....	6
Tabel 1.2 Data Jumlah ASN DPUTR Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029.....	21
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029 Per Indikator Kinerja.....	23
Tabel 2.5 Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.....	26
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	28
Table 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	30
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	71
Tabel 3.2 Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.....	4
Gambar 3.1 Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dan Saluran Drainase.....	36
Gambar 3.2 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih.....	41
Gambar 3.3 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Septik Tank Individu di Kecamatan Banjaran.....	46
Gambar 3.4 Kegiatan Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung.....	55
Gambar 3.5 Kegiatan Verifikasi Lapangan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung.....	55
Gambar 3.6 Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan.....	59
Gambar 3.7 Peresmian Jembatan Roda Dua Cijeruk	59
Gambar 3.8 Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.....	64
Gambar 3.9 Kegiatan Monitoring Pengendalian Penataan Ruang dan Koordinasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal tersebut, maka diterbitkanlah regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Atas dasar hal tersebut diatas, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung kepada Bupati Bandung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025. Laporan Kinerja ini mengacu pada tugas dan fungsi dalam bentuk capaian program dan kegiatan yang termuat pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan organisasi yang telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan LKIP ini adalah sebagai upaya dalam mewujudkan visi, misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menunjang pada visi, misi Kabupaten Bandung melalui adanya suatu pembaharuan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama jangka waktu satu tahun oleh seluruh sub unit yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

A. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, maka struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung terdiri dari :

a. Kepala Dinas, membawahkan :

- Sekretariat;
- Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum;
- Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan;
- Bidang Jalan;
- Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi;
- Bidang Bangunan Gedung dan Pengembangan Permukiman;
- Bidang Tata Ruang;
- UPTD.

b. Sekretaris, membawahkan :

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, membawahkan :
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengolah Data dan Informasi;
 3. Operator Layanan Operasional; dan
 4. Pengadministrasi Perkantoran.
- **Sub Bagian Keuangan**, membawahkan :
 1. Penelaah Teknis Kebijakan;
 2. Pengolah Data dan Informasi;
- Perencana;
- Penelaah Teknis Kebijakan; dan
- Pengolah Data dan Informasi.

c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penyediaan Air Minum,

membawahkan :

- Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda;
- Penelaah Teknis Kebijakan;
- Pengolah Data dan Informasi;
- Pengelola Layanan Operasional;
- Operator Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Pengadministrasi Perkantoran.

d. Bidang Drainase dan Penyedia Infrastruktur Persampahan,

membawahkan :

- Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda;
- Penelaah Teknis Kebijakan;
- Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- Pengolah Data dan Informasi;
- Pengadministrasi Perkantoran.

e. Bidang Jalan, membawahkan :

- Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
- Penelaah Teknis Kebijakan;
- Pengolah Data dan Informasi; dan
- Pengelola Layanan Operasional.

f. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi, membawahkan :

- Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
- Penelaah Teknis Kebijakan;
- Pengolah Data dan Informasi;
- Pengadministrasi Perkantoran; dan
- Pengelola Umum Operasional.

g. Bidang Bangunan Gedung dan Pengembangan Permukiman,

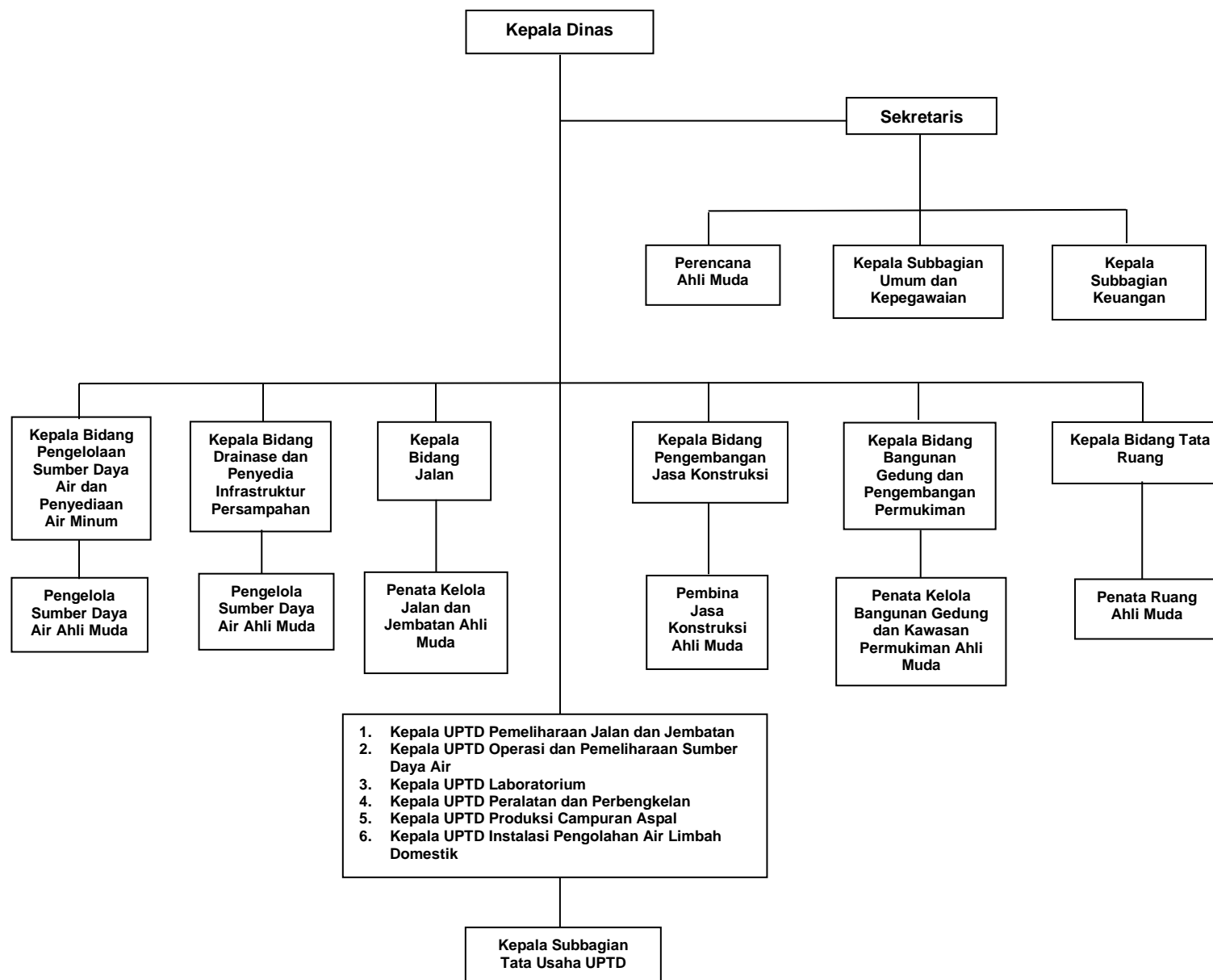
membawahkan :

- Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda;
- Penata Layanan Operasional;
- Penelaah Teknis Kebijakan;
- Pengelola Layanan Operasional;

- Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
- h. Bidang Tata Ruang**, membawahkan :
- Penata Ruang Ahli Muda;
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang
- i. UPTD terdiri dari :**
- UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - UPTD Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - UPTD Laboratorium;
 - UPTD Peralatan dan Perbengkelan;
 - UPTD Produksi Campuran Aspal;
 - UPTD Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun struktur organisasi yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Bandung



Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 13 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Salah satu faktor penentu keberhasilan/kegagalan organisasi adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya, seperti SDM dan Keunggulan Kompetitif. Sebaliknya, SDM merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial karena kompetensi yang dimilikinya berupa intelektualitas, sifat, keterampilan, karakter personal, serta proses intelektual dan kognitif.

Keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang didukung oleh SDM yang berkualitas. Peningkatan SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilakukan melalui Bimtek, Pelatihan serta Diklat.

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung sebanyak **331 orang**, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Data Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
DPUTR Kabupaten Bandung**

No.	Nama Jabatan	Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1.	Kepala Dinas (Eselon II/b)	1	-
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	1	-
3.	Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	2
4.	Kepala Subbag (Eselon IV/a)	1	1
5.	Kepala UPTD (Eselon IV/a)	10	4
6.	Kepala UPTD (Eselon IV/b)	3	-
7.	Kepala Subbag TU UPTD (Eselon IV/b)	8	6

8.	Jabatan Fungsional	17	8
9.	Pelaksana (Staf) :		
	▪ Pegawai ASN	233	32
	Jumlah Total Pegawai	278	53

Sumber : Subbag Umpeg Dinas PUTR Tahun 2025

Tabel 1.2
Data Jumlah ASN DPUTR Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Pegawai Pria	Pegawai Wanita
1	SD	7	-
2	SMP	16	-
3	SMA/SMK	134	5
4	D-I	1	-
5	D-II	-	
6	D-III	6	6
7	D-IV	-	-
8	S-1	103	33
9	S-2	12	6
10	S-3	1	1
Jumlah		280	51

Sumber : Subbag Umpeg Dinas PUTR Tahun 2025

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 sebanyak 136 orang atau sekitar 41% telah berpendidikan Sarjana S1. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme perencana dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung. Termasuk didalamnya telah ada tenaga ahli perencanaan dan ada juga yang telah mengikuti diklat perencanaan dan diklat teknis lapangan. Pegawai dengan pendidikan tinggi tentunya diharapkan akan lebih kompeten, terampil, produktif, kreatif, inovatif serta memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan berdampak pada organisasi.

B. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung menjalankan pelayanan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan semakin baiknya kondisi di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tersebut diharapkan akan semakin merata dan sejahteranya kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat Kabupaten Bandung.

Analisa terhadap isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas, daerah/masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, yaitu :

- 1) Belum Optimalnya Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana.
- 2) Belum meratanya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Konektivitas Jalan, dan Jembatan Antar Wilayah.
- 3) Masih Banyaknya Trotoar di Kabupaten Bandung yang Tidak Responsif Gender Terutama Bagi Kaum Difabel dan Para Lansia.
- 4) Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar (Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak).
- 5) Terbatasnya Sistem Pengelolaan Limbah Domestik dan Infrastruktur Persampahan.
- 6) Belum Optimalnya Peningkatan Infrastruktur Drainase dan Sistem Pengendalian Banjir.
- 7) Belum Optimalnya Pengelolaan DAS dan Daya Dukung Infrastruktur Irigasi.
- 8) Belum Semua Bangunan Gedung Pemerintah Memiliki Sarana dan Prasarana yang Mendukung dan Mengakomodir Kebutuhan Kaum Disabilitas dan Lansia.
- 9) Belum Optimalnya Kompetensi dan Kualifikasi SDM dalam Mendukung Pembangunan di Bidang Konstruksi.

Adapun Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2025 ada pada Isu ke-4, yaitu : belum meratanya pembangunan infrastruktur wilayah yang kokoh dan berketahanan dalam menghadapi tantangan dan dinamika pembangunan dengan prioritas pembangunan RKPD peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasar kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 281 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 146 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 146);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 227 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2026;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

D. Sistem Penyajian

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah (RPJMD/Renstra baru), sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistem penyajian LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Renstra 2025-2029 (jelaskan masa transisi peralihan dari Renstra lama ke Renstra baru (Renstra hasil reviu/perubahan Renstra) tujuan, sasaran, indikator dan target Renstra selama lima tahun, penjelasan IKU lama dan baru dan Perjanjian Kinerja lama dan Perjanjian Kinerja baru 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, jelaskan capaian kinerja 5 tahun sebagai akuntabilitas kinerja lima tahunan periode RPJMD 2021-2026;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, termasuk faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja 5 tahun RPJMD 2021-2026;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, sampaikan kondisi efisiensi Tahun 2025 (Perbup No. 10 Tahun 2025), dampak nasional dan daerah;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaian serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif serta memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintahan yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan didalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan foto permasalahan unit organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dalam pengelolaan/manajemen kepegawaian.

Adapun Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS) Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”***.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bandung di atas, dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berakhlak dan berkarakter dengan didukung keberpihakan penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
5. Menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung masuk pada Misi ke-4, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan”**.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 281 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung ini telah memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, serta mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis.

Renstra ini merupakan perencanaan tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan guna mendukung pembangunan di Kabupaten Bandung.

Rencana strategis ini memuat Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Target pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

**2.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung**
Tabel 2.1
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	42,05%	44,11%	46,19%	48,10%	50,00
		Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak	90,92%	91,08%	91,27%	91,41%	91,58%
		Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Aman	21,26%	25,20%	29,13%	33,07%	37,01%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	93,75%	94,00%	94,66%	95,00%	95,66%
		Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	23,02%	28,40%	33,77%	39,15%	44,52%
	Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	15,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	15,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	62,00%	65,00%	70,00%	70,55%	75,00%
	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,09%	85,09%	86,09%	87,09%	88,09%
	Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	28,57%	39,28%	50,00%	60,71%	80,35%
	Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	27,00%	86,00%	92,00%	94,00%	97,00%

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terdapat perbedaan dari tujuan, sasaran hingga indikator sasaran dibanding dengan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pada Renstra Tahun 2025-2029 hanya terdapat 1 tujuan sedangkan pada Renstra Tahun 2021-2026 terdapat 7 tujuan kemudian pada sasaran Renstra Tahun 2025-2029 terdapat pengurangan sasaran menjadi 8 sasaran dari sebelumnya 9 sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026. Kemudian untuk indikator sasaran terdapat 11 indikator sasaran pada Renstra Tahun 2025-2029 lebih sedikit dibanding indikator sasaran pada Renstra Tahun 2021-2026 yang berjumlah 12 indikator sasaran.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Setelah Perubahan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas E-Government Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Nilai AKIP	A (81,20)	A (81,50)	A (81,75)	A (82,00)	A (82,25)
		Nilai BMD	98,50%	98,60%	98,70%	N/a	N/a
		Nilai IKM	N/a	N/a	N/a	91,00%	92,00%
Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	87,90%	88,66%	71,68%	76,00%	82,00%
Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi	27,08%	48,32%	64,29%	82,14%	100,00%
Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	43,00%	45,00%	47,00%	49,00%	51,00%
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir	29,69%	30,80%	44,07%	46,14%	48,33%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Setelah Perubahan				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	67,96%	69,31%	66,45%	67,45%	68,05%
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Akses Layak Terhadap Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Sanitasi	91,55%	94,77%	93,66%	94,72%	95,77%
	Meningkatnya Akses Layak Terhadap Air Bersih	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih	90,73%	95,37%	89,50%	93,50%	95,00%
Terwujudnya Bangunan Pemerintah yang Representatif	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Meningkatkan Kerasian Arah Pembangunan dengan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan	61,54%	73,08%	87,50%	95,83%	100,00%

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Maksud dari Perubahan Rencana Strategis ini untuk menselaraskan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 terdapat beberapa perubahan target sasaran dan indikator sasaran untuk Tahun 2024-2025, yaitu Indikator Sasaran Persentase Kondisi

Jalan Kabupaten Mantap, Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir, Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan.

Indikator Sasaran Nilai Barang Milik Daerah untuk Tahun 2025 dan 2026 pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dihilangkan dan diganti dengan Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada Dokumen Perubahan Renstra DPUTR Tahun 2021-2026 terdapat perubahan nama sasaran dan indikator sasaran, yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya Akses Aman Terhadap Sanitasi dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi menjadi Meningkatnya Akses Layak Terhadap Sanitasi dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Sanitasi.
2. Sasaran Meningkatnya Akses Aman Terhadap Air Bersih dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih menjadi Meningkatnya Akses Layak Terhadap Air Bersih dengan Indikator Sasaran Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung

Salah satu indikator kinerja utama yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) adalah Indeks Kualitas Infrastruktur. Penetapan target IKK berfungsi sebagai instrument monitoring dan evaluasi, sekaligus memastikan keterkaitan langsung antara kebijakan, program, dan kegiatan DPUTR dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (IKI PUTR)	Menggunakan <i>Weighted Composite Index (WCI)</i> dalam menghitung indikator. Komponen indikator berupa seluruh nilai indikator sasaran DPUTR

Indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Indeks Kualitas Infrastruktur, yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah secara komprehensif. Indeks ini dihitung menggunakan metode *Weighted Composite Index (WCI)*, dengan memperhitungkan berbagai komponen indikator sasaran DPUTR, antara lain luas kawasan rawan banjir, penyediaan akses air minum, akses sanitasi, bangunan gedung, jaringan jalan, ruang terbuka hijau, serta kesesuaian pemanfaatan ruang. Dengan pendekatan ini, pengukuran kinerja tidak hanya menekankan pada capaian kuantitatif, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama serta berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 281 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung terdiri dari 9 indikator kinerja.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra DPUTR Tahun 2025-2029 Per Indikator Kinerja

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	$\frac{\text{Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir}}{\text{Total Luas Kawasan Banjir}} \times 100\%$
2.			Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$
3.			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$
4.			Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	$\frac{\text{Jumlah Unit Infrastruktur yang Dibangun di Kawasan Strategis}}{\text{Target Kawasan Infrastruktur di Kawasan Strategis}} \times 100\%$



No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA
5.			Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Strategis yang Memenuhi Ketentuan}}{\text{Total Bnagunan Gedung Strategis di Wilayah}} \times 100\%$
6.			Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	$\frac{\text{Jumlah Unit Infrastruktur yang Ditata (Ditingkatkan) di Kawasan Strategis}}{\text{Target Kawasan Infrastruktur di Kawasan Strategis}} \times 100\%$
7.			Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap}}{\text{Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$
8.			Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Target Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi}} \times 100\%$
9.			Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah Dokumen RTR yang Ditetapkan}}{\text{Target RTR yang Ditetapkan}} \times 100\%$

Tabel 2.5
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

No.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$
2.			Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Saluran Drainase Perkotaan Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Saluran Drainase Kabupaten Bandung}} \times 100\%$
3.		Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang Saluran Irigasi Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Saluran Irigasi}} \times 100\%$
4.			Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih
5.		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi		$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung}} \times 100\%$

Adanya Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Tahun 2023, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung pun mengalami perubahan menyesuaikan dengan Perubahan Renstra. Indikator Kinerja Perubahan IKU berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap, Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik, Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi. Indikator-indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat makro dan merupakan IKU Bupati Kabupaten Bandung. Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi merupakan Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) sehingga kedua indikator kinerja ini dimasukkan kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2024.

2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	
1	Meningkatnya Kualitas E-Government Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Nilai AKIP	81,75	
			Nilai BMD	98,70%	
2	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman	Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	90,16%	
3	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil yang Tersertifikasi	69,22%	
4	Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	47,00%
			Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir	31,91%	
			Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	70,66%	
5	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Meningkatnya Akses Aman Terhadap Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi	98,00%	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
		Meningkatnya Akses Aman Terhadap Air Bersih	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih	100,00%
6	Terwujudnya Bangunan Pemerintah yang Representatif	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas	60,00%
7	Meningkatkan Keserasian Arah Pembangunan dengan Tata Ruang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan	84,62%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026, maka Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025, terdiri dari 9 Sasaran dan 11 Indikator Kinerja.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	42,05%
			Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Terhadap Air Minum yang Layak	90,92%
2	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	93,75%
3		Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	15,00%
4		Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	15,00%
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	62,00%
5		Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,09%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
6		Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	28,57%
7		Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	27,00%

Berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 mengalami perubahan, maka Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 juga mengalami perubahan, yaitu terdiri dari 1 Tujuan, 8 Sasaran dan 9 Indikator Kinerja.

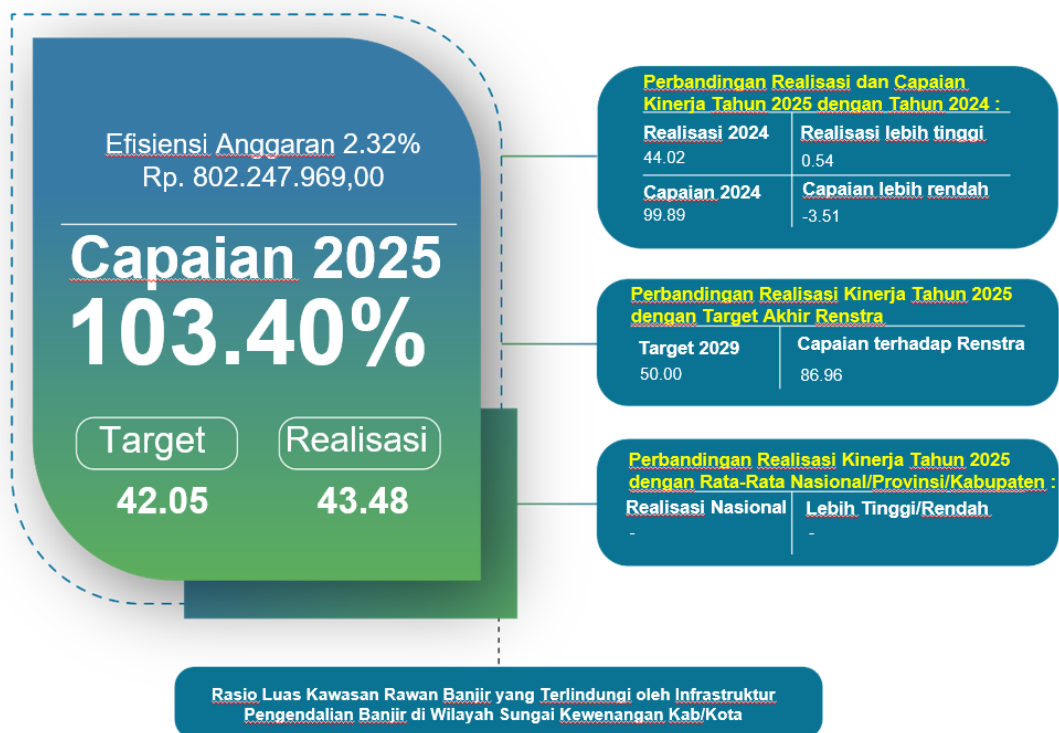
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung

3.1. Sasaran 1 : Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

3.1.1 Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota



Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota sebesar 103,40%, yaitu dari target sebesar 42,05% terealisasi sebesar 43,48%. Realisasi Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota menurun 0,54% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 44,02% dan Tahun 2025 sebesar 43,48%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan

Kab/Kota mengalami peningkatan sebesar 3,51% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 99,89% dan pada Tahun 2025 sebesar 103,40%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 42,05% dengan realisasi 43,48% dengan capaian 103,40%.

Capaian Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	42,05%	43,48%	103,40%

Formula indikator sasaran Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota adalah Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi Insfrastruktur Pengendali Banjir dibagi Total Luas Kawasan Rawan Banjir dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 86,96%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 50,00% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 43,48%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota dapat dilihat pada gambar berikut :



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota, antara lain Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi, Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai, Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing, Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing, Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya, dan Terehabilitasinya Tanggul Sungai.

Tercapainya Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota ditandai dengan capaian Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi terealisasi sebesar 100,00%, Normalisasi/Restorasi Sungai terealisasi sebesar 100,00%, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing terealisasi sebesar 100,00%, Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing terealisasi sebesar 100,00%, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya terealisasi sebesar 100,00% dan Rehabilitasi Tanggul Sungai terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Terintegrasi, Efektifnya Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan, Pengawasan, Monitoring Bantaran dan Tanggul Sungai, Mengoptimalkan Kegiatan Pemeliharaan dan Normalisasi Sungai, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang Ketat Mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Area Resapan Air Mendorong Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir yang Sesuai.

Program yang mendukung pencapaian Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Efisiensi anggaran untuk mencapai Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota sebesar 2,32% atau senilai Rp. 802.247.969,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 34.621.232.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 33.818.984.181,00.



Gambar 3.1

Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dan Saluran Drainase

3.2. Sasaran 1 : Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

3.2.1. Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak



Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak sebesar 100,01%, yaitu dari target sebesar 90,92% terealisasi sebesar 90,93%. Realisasi Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak meningkat 0,18% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 90,75% dan Tahun 2025 sebesar 90,93%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak mengalami penurunan sebesar 1,39% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 101,40% dan pada Tahun 2025 sebesar 100,01%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 90,92% dengan realisasi 90,93% dengan capaian 100,01%.

Capaian Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	90,92%	90,93%	100,01%

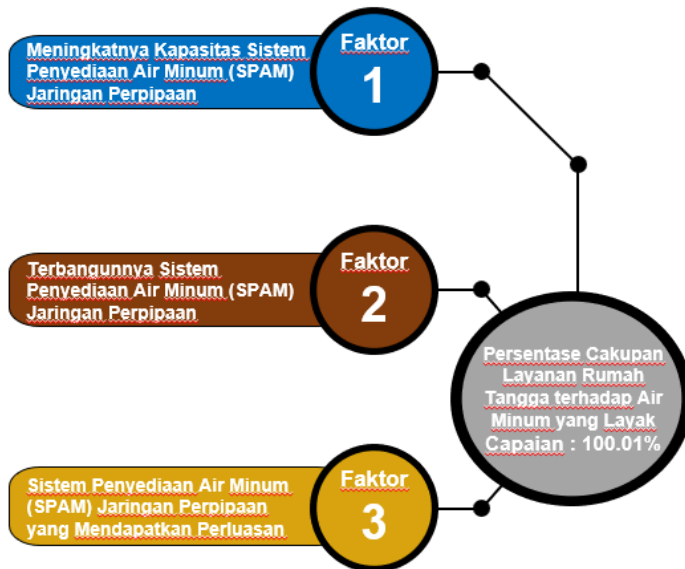
Formula indikator sasaran Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak adalah Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Air Minum yang Layak dibagi Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung x 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 99,29%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 91,58% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 90,93%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak Tahun 2025 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 5,53% dari rata-rata nasional sebesar 96,46%.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak dapat dilihat pada gambar berikut :

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak, antara lain Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Mendapatkan Perluasan.

Tercapainya Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak ditandai dengan capaian Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan terealisasi sebesar 100,00%, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan terealisasi sebesar 94,66%, dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan terealisasi sebesar 94,31%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Tersedianya Kegiatan SPAM dengan Pembiayaan Alternatif (Pusat/DAK, Hibah, Wilantropis), Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Daerah Tangkapan Air, Meningkatkan Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Melalui Penambahan Jumlah Jaringan Pelayanan.

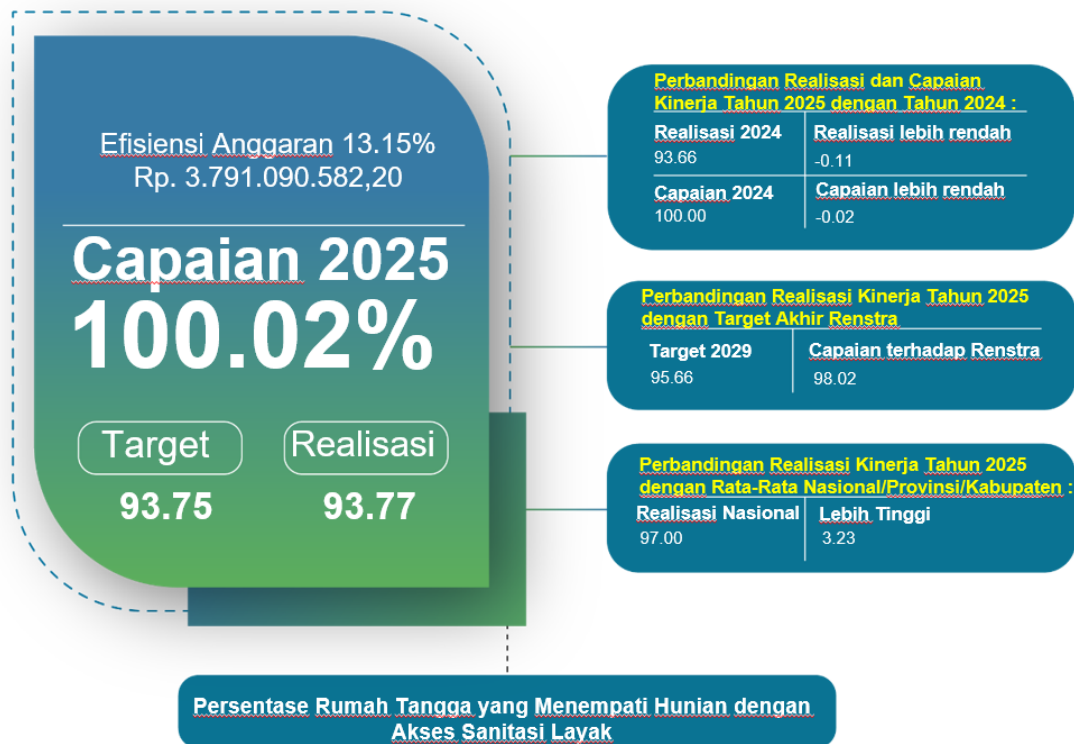
Program yang mendukung pencapaian Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Efisiensi anggaran untuk mencapai Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak sebesar 6,41% atau senilai Rp. 2.250.993.919,44. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 35.100.847.798,44 dan terealisasi sebesar Rp. 32.849.853.879,00.



Gambar 3.2
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

3.3. Sasaran 2 : Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi

3.3.1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak



Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 100,02%, yaitu dari target sebesar 93,75% terealisasi sebesar 93,77%. Realisasi Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak meningkat 0,11% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 93,66% dan Tahun 2025 sebesar 93,77%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak meningkat sebesar 0,02% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00% dan pada Tahun 2025 sebesar 100,02%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 93,75% dengan realisasi 93,77% dengan capaian 100,02%.

Capaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	93,75%	93,77%	100,02%

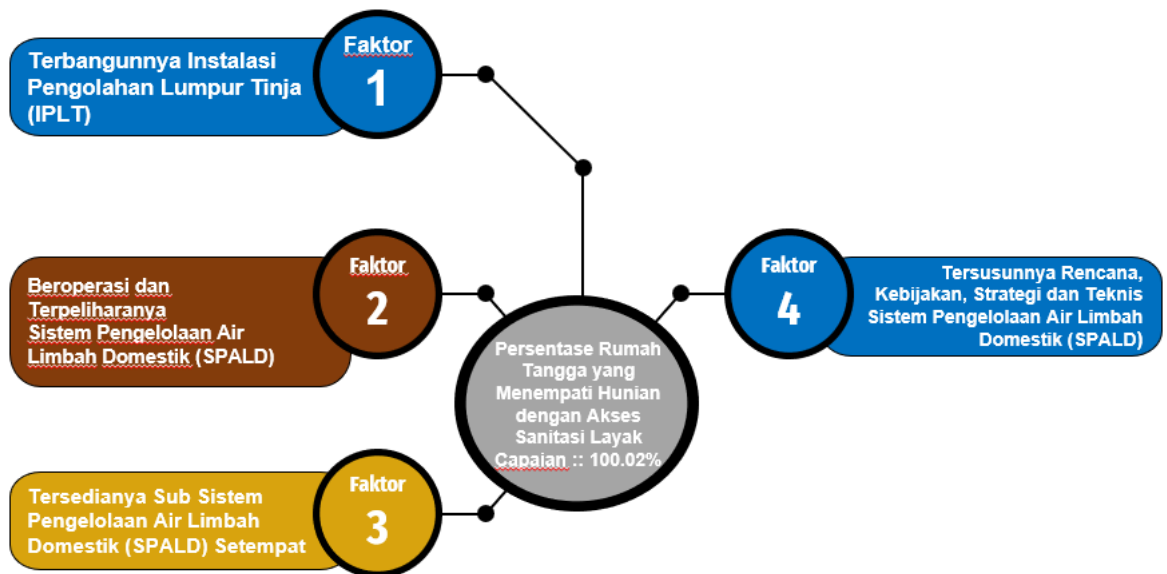
Formula indikator sasaran Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak adalah Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi Layak dibagi Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 98,02%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 95,66% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 93,77%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2025 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 3,23% dari rata-rata nasional sebesar 97,00%.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak dapat dilihat pada gambar berikut :

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak, antara lain Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat, dan Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Tercapainya Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak ditandai dengan capaian Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terealisasi sebesar 100,00%, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terealisasi sebesar 100,00%, Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat terealisasi sebesar 100,00%, dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Komitmen Pemerintah dalam Kebijakan dan Anggaran yang Mendukung Pembangunan Sanitasi, Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik Individu maupun Komunal, Perlu Dibangun IPLT Baru untuk Pelayanan Akses Aman Sanitasi, dan Ketersediaan Fasilitas Pendukung seperti TPS-3R, dan Lahan yang Memadai untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan.

Program yang mendukung pencapaian Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak, yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Efisiensi anggaran untuk mencapai Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak sebesar 13,15% atau senilai Rp. 3.791.090.582,20. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 28.822.762.691,20 dan terealisasi sebesar Rp. 25.031.672.109,00.



Gambar 3.3
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)
Septik Tank Individu di Kecamatan Banjaran

3.4. Sasaran 4 : Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten

3.4.1. Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten



Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten Tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten sebesar 100,00%, yaitu dari target sebesar 15,00% terealisasi sebesar 15,00%. Realisasi Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten mengalami penurunan sebesar 45,00% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 60,00% dan pada Tahun 2025 sebesar 15,00%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten capaiannya sama sebesar 100,00% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00% dan pada Tahun 2025 sebesar 100,00%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 15,00% dengan realisasi 15,00% dengan capaian 100,00%.

Capaian Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	15,00%	15,00%	100,00%

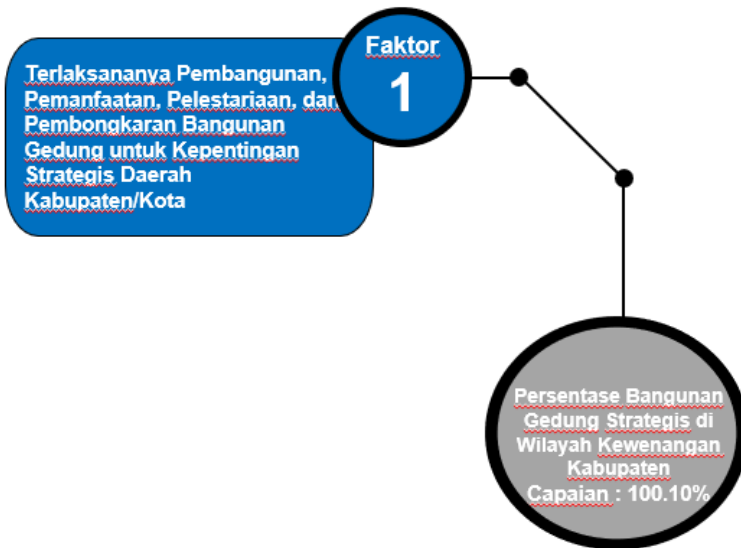
Formula indikator sasaran Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten adalah Jumlah Bangunan Gedung Strategis yang Memenuhi Ketentuan dibagi Total Bangunan Gedung Strategis di Wilayah dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 18,75%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 80,00% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 15,00%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut :

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten, antara lain Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Tercapainya Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten ditandai dengan capaian Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :

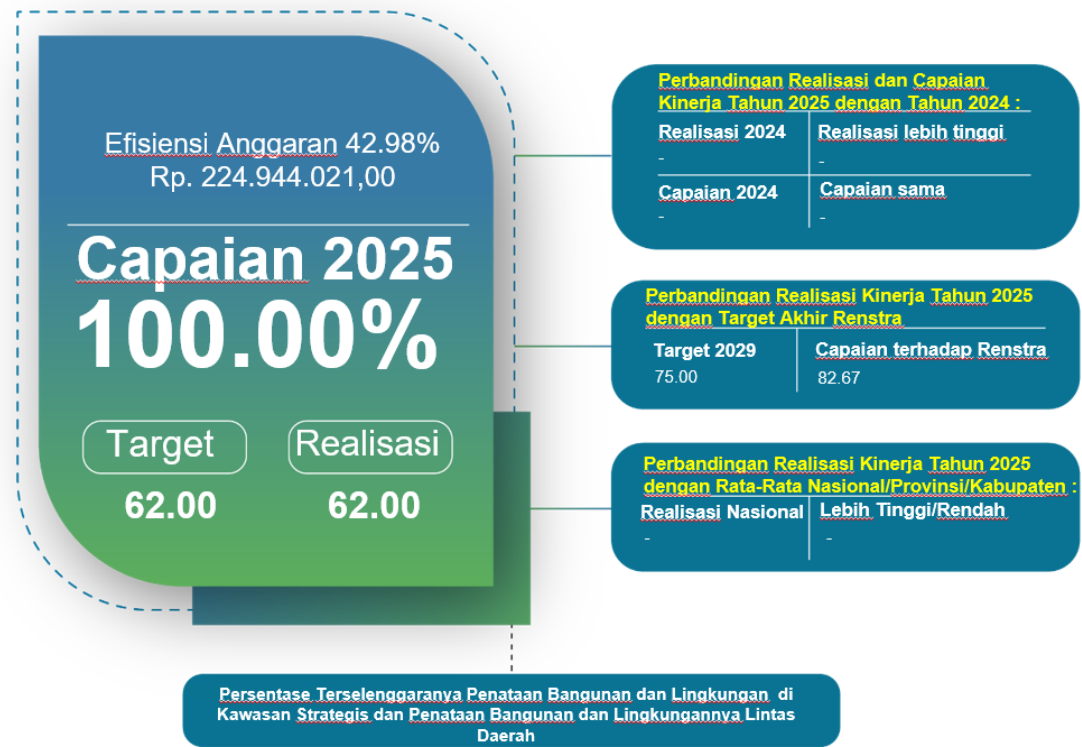


Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Penataan Bangunan Gedung yang Baik dapat Menciptakan Ruang Publik yang Aman, Nyaman, dan Ramah bagi Pengguna, seperti Pejalan Kaki, Pengendara Sepeda, dan Pengguna Transportasi Umum, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Bandung dalam Melakukan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Melalui Sosialisasi dan Melakukan Panggilan/Pemberitahuan/Teguran-Teguran kepada Masyarakat yang sedang Membangun sebagai Bahan Potensi PBG dalam Mencapai Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemasukan Kas Daerah Guna Mendanai Pembangunan, Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung serta Penggunaan Material Bersertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) Guna Menjamin Mutu Bangunan.

Program yang mendukung pencapaian Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten, yaitu Program Penataan Bangunan Gedung. Efisiensi anggaran untuk mencapai Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas sebesar 9,06% atau senilai Rp. 10.248.170.982,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 113.110.948.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 102.862.777.018,00.

3.5. Sasaran 5 : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah

3.5.1. Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah



Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah Tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah sebesar 100,00%, yaitu dari target sebesar 62,00% terealisasi sebesar 62,00%. Realisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun sebelumnya dan dari aspek pencapaian kinerja, Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah capaiannya juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Hal dikarenakan Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah merupakan target Indikator Kinerja Utama (IKU) baru pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 62,00% dengan realisasi 62,00% dengan capaian 100,00%.

Capaian Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	62,00%	62,00%	100,00%

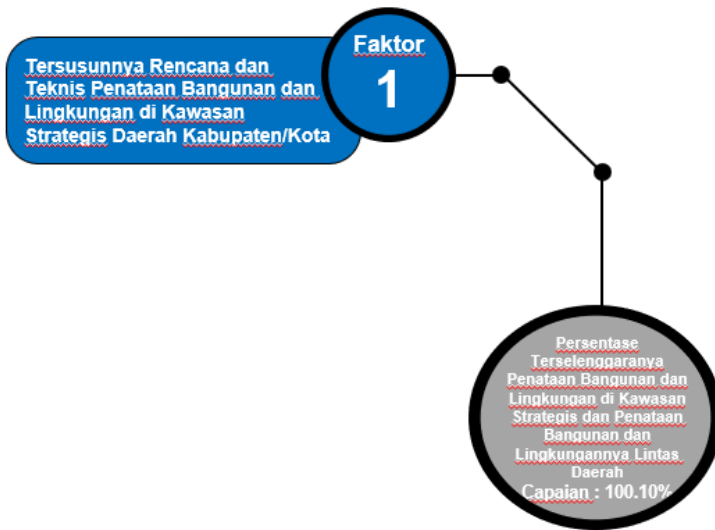
Formula indikator sasaran Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah adalah Jumlah Unit Infrastruktur yang Ditata/Ditingkatkan di Kawasan Strategis dibagi Target Kawasan Infrastruktur di Kawasan Strategis dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 82,67%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 75,00% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 62,00%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

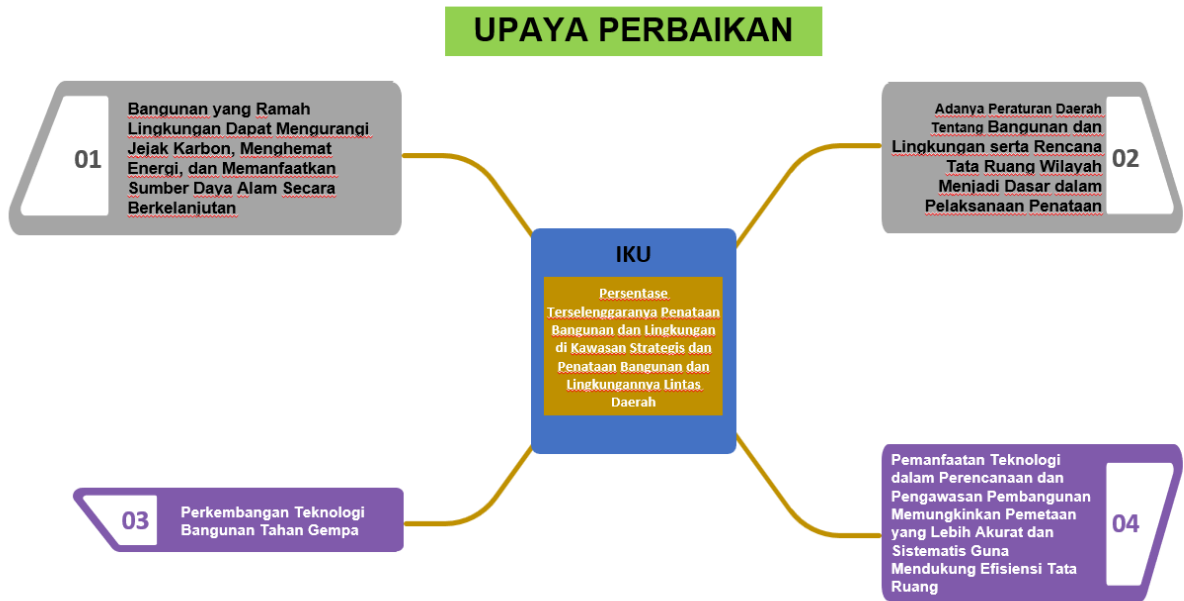
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah, antara lain Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Tercapainya Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah ditandai dengan capaian Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :

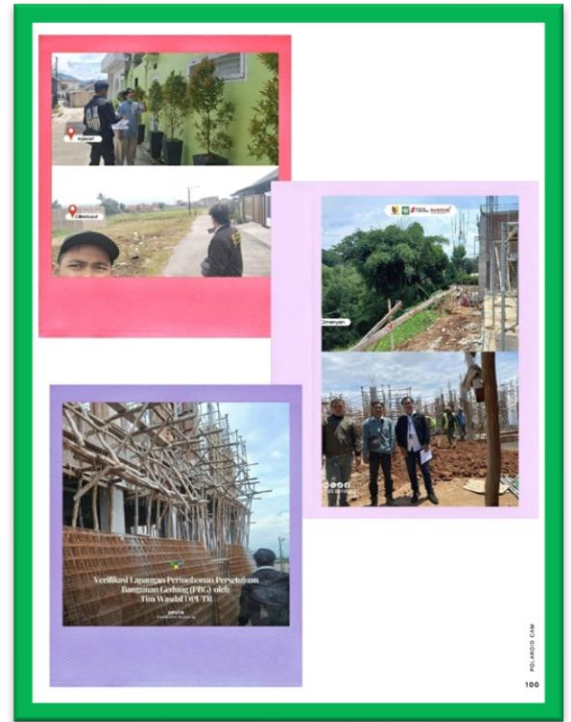


Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Bangunan yang Ramah Lingkungan dapat Mengurangi Jejak karbon, Menghemat Energi, dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan, Adanya Peraturan Daerah Tentang Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Menjadi Dasar dalam Pelaksanaan Penataan, Perkembangan Teknologi Bangunan Tahan Gempa, dan Pemanfaatan Teknologi dalam Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Memungkinkan Pemetaan yang Lebih Akurat dan Sistematis Guna Mendukung Efisiensi Tata Ruang.

Program yang mendukung pencapaian Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah, yaitu Program Penataan Penataan Bangunan dan Lingkungannya. Efisiensi anggaran untuk mencapai Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas sebesar 42,98% atau senilai Rp. 224.944.021,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 523.423.021,00 dan terealisasi sebesar Rp. 298.479.000,00.



Gambar 3.4
Kegiatan Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung



Gambar 3.5
Kegiatan Verifikasi Lapangan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

3.6. Sasaran 6 : Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman

3.6.1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten



Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten sebesar 101,96%, yaitu dari target sebesar 84,09% terealisasi sebesar 85,74%. Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten mengalami peningkatan sebesar 2,65% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 83,09% dan Tahun 2025 sebesar 85,74%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten mengalami penurunan sebesar 13,96% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 115,92% dan pada Tahun 2025 sebesar 101,96%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 84,09% dengan realisasi 85,74 dengan capaian 101,96%.

Capaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	84,09%	85,74%	101,96%

Formula indikator sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap dibagi Total Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Kondisi Jalan Kabupaten Mantap Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 97,33%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 88,09% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 85,74%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2025 berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 7,77% dari rata-rata nasional sebesar 93,51%.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut :



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, antara lain Terbangunnya Jalan, Terekonstruksinya Jalan, Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin, Terehabilitasinya Jembatan, Terehabilitasinya Jalan, Terpeliharanya Jalan Secara Rutin.

Tercapainya Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten ditandai dengan capaian Pembangunan Jalan terealisasi sebesar 100,00%, Rekonstruksi Jalan terealisasi sebesar 100,00%, Pemeliharaan Rutin Jembatan terealisasi sebesar 100,00%, Rehabilitasi Jembatan terealisasi sebesar 100,00%, Rehabilitasi Jalan terealisasi sebesar 100,00 dan Pemeliharaan Rutin Jalan terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Peningkatan Aksesibilitas Wilayah Guna Memperlancar Distribusi Arus Barang dan Jasa serta Mobilitas Penduduk, Mengoptimalkan Koordinasi Antar *Stakeholder* dan Instansi/OPD Lain Terutama dengan Dinas Perhubungan Mengenai Batas Muatan (*overloaded*) Kendaraan yang Diperbolehkan Melintasi Ruas-Ruas Jalan Kabupaten, Optimalisasi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan, dan Penyediaan Alat Berat yang Memadai dan Infrastruktur Pendukung Lainnya yang Mempercepat Proses Pembangunan.

Program yang mendukung pencapaian Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten, yaitu Program Penyelenggaraan Jalan. Efisiensi anggaran untuk mencapai Kondisi Jalan Kabupaten Mantap sebesar 5,08% atau senilai Rp. 13.974.847.757,80. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 274,833.315.729,80 dan terealisasi sebesar Rp. 260.858.467.972,00.



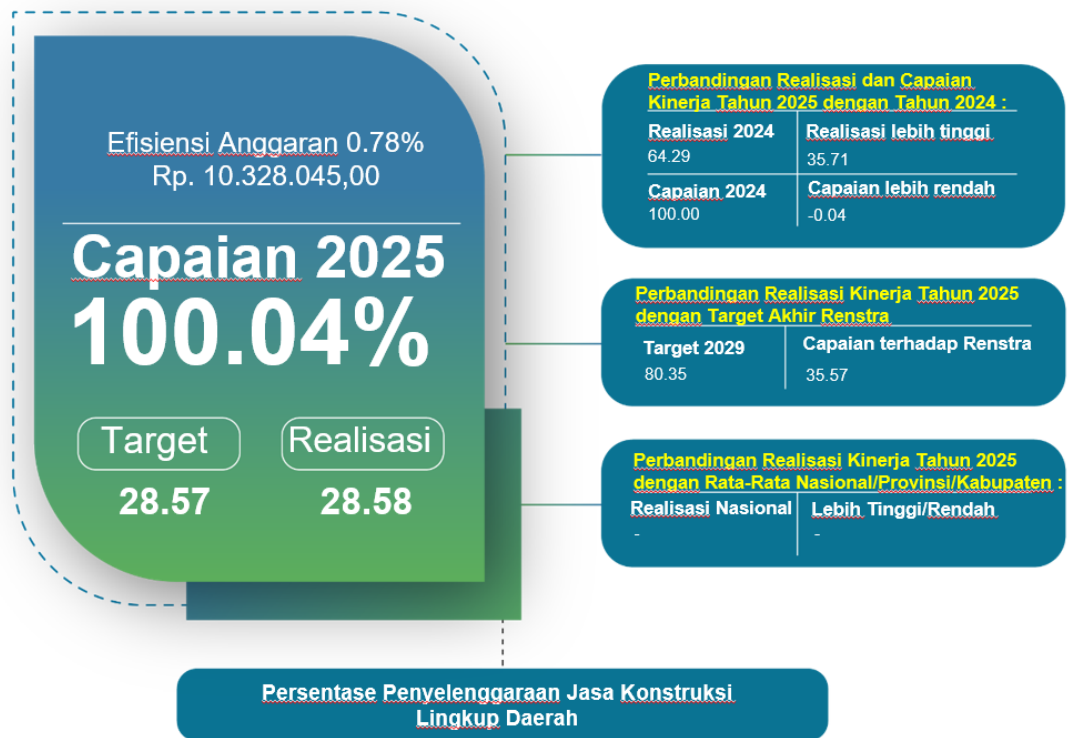
Gambar 3.6
Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan



Gambar 3.7
Peresmian Jembatan Roda Dua Cijeruk

3.7. Sasaran 7 : Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah

3.7.1. Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah



Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah Tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah sebesar 100,04%, yaitu dari target sebesar 28,57% terealisasi sebesar 28,58%. Realisasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah mengalami penurunan sebesar 35,71% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 64,29% dan Tahun 2025 sebesar 28,58%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah capaiannya mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 100,00% dan pada Tahun 2025 sebesar 100,04%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 28,57% dengan realisasi 28,58% dengan capaian 100,04%.

Capaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	28,57%	28,58%	100,04%

Formula indikator sasaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah adalah Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi dibagi Jumlah Target Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 35,57%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 80,35% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 28,58%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

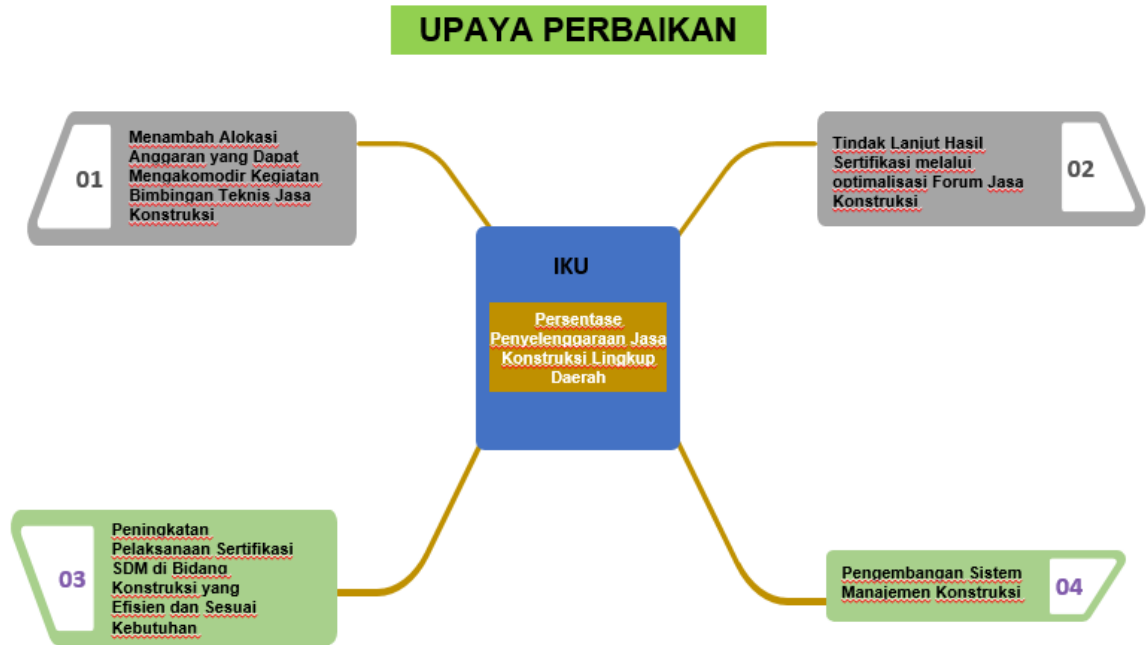
FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN



Faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah, antara lain Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan

Tercapainya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah ditandai dengan capaian Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Menambah Alokasi Anggaran yang dapat Mengakomodir Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi, Tindak Lanjut Hasil Sertifikasi Melalui Optimalisasi Forum Jasa Konstruksi, Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi SDM di Bidang Konstruksi yang Efisien dan Sesuai Kebutuhan, dan Pengembangan Sistem Manajemen Konstruksi.

Program yang mendukung pencapaian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah, yaitu Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Efisiensi anggaran untuk mencapai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah sebesar 0,78% atau senilai Rp. 10.328.045,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.317.482.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.307.153.955,00



Gambar 3.8
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

3.8. Sasaran 8 : Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang

3.8.1. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang



Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan pencapaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 100,00%, yaitu dari target sebesar 27,00% terealisasi sebesar 27,00%. Realisasi Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang mengalami penurunan sebesar 65,31% dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2024 sebesar 92,31% dan Tahun 2025 sebesar 27,00%. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang mengalami penurunan sebesar 5,50% dari capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 105,50% dan pada Tahun 2025 sebesar 100,00%.

Hal ini dikarenakan adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Target Tahun 2025, yaitu 27,00% dengan realisasi 27,00% dengan capaian 100,00%.

Capaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025			
No.	Target	Realisasi	Capaian
1.	27,00%	27,00%	100,00%

Formula indikator sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah Jumlah Dokumen RTR yang Ditetapkan dibagi Target RTR yang Ditetapkan dikali 100%.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, indikator sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2025 masih berada di bawah target akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung yang mencapai 27,84%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 97,00% terealisasi pada Tahun 2025 sebesar 27%.

Dilihat pada skala nasional, indikator sasaran Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang tidak bisa dianalisis karena hanya digunakan di Pemerintah Kabupaten Bandung.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat dilihat pada gambar berikut :



Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, antara lain Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam rangka Penerbitan Persetujuan Substansi, Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman, Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan, Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, Tersedianya Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, dan Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Tercapainya Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang ditandai dengan capaian Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100,00%, Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100,00%, Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar 100,00%, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang terealisasi sebesar 100,00%, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang terealisasi sebesar 100,00%, dan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang terealisasi sebesar 100,00%.

Untuk mengakselerasi kinerja pada Tahun 2026 perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Tahun 2026, antara lain Ketersediaan Anggaran, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dan Penyusunan Regulasi Tentang Tata Ruang, Peningkatan Monev Pemanfaatan Ruang dan Tindakan Penertiban Terhadap Pemanfaatan Ruang, dan Adanya Pengendalian Dampak Kegiatan Pembangunan Terhadap Lingkungan.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Efisiensi anggaran untuk mencapai Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar 10,05% atau senilai Rp. 415.349.430,00. Adapun efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.132.071.900,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.716.722.470,00.



Gambar 3.9

Kegiatan Monitoring Pengendalian Penataan Ruang dan Koordinasi Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

➤ **Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung**

1. Melakukan evaluasi penyebab keterlambatan capaian (perencanaan.anggaran, atau teknis) serta menyusun rencana aksi perbaikan agar pembangunan bangunan pengendali banjir teriaksana tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Melakukan perbaikan proses inventarisasi dan penertiban Barang Milik Daerah (BMD) melalui pemutakhiran data dan koordinasi lintas OPD untuk mendukung pencapaian target kondisi baik 100%.

➤ **Tindak Lanjut atas Rekomendasi Catatan Kekurangan untuk Perbaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung**

1. Salah satu kegiatan dalam pengendalian banjir yang dilaksanakan adalah :
 - a. Konservasi sungai dilakukan dengan tujuan untuk menjaga fungsi sungai dengan melakukan perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran sungai.
 - b. Pengendalian daya rusak air sungai dilakukan melalui pengelolaan risiko banjir dengan tujuan untuk mengurangi kerugian banjir yang dilakukan secara terpadu bersama pemilik kepentingan.

Kegiatan pengendalian banjir dilaksanakan dengan kebijakan terintegrasi dan komprehensif, diantaranya :

- a. Kerja sama lintas sektor : melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan banjir.
- b. Keinginan politik : memiliki komitmen politik yang kuat untuk mendukung implementasi kebijakan pengendalian banjir secara berkelanjutan.
- c. Perencanaan jangka panjang : mengembangkan rencana induk (master plan) yang komprehensif dan terintegrasi.
- d. Pendanaan : menyediakan anggaran yang memadai, seperti melalui APBD untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan pengendalian banjir.

UPTD Sub DAS dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bangunan pengendali banjir dapat melaksanakan pemeliharaan sungai yang terdiri dari :

- a. Penatusahaan sungai,
- b. Pemeliharaan ruang sungai, pengendalian dan pemanfaatan ruang sungai.
- c. Pemeliharaan dataran banjir dan pengendalian pemanfaatan dataran banjir.

- d. Restorasi sungai.
-
- 2.
 - a. Melakukan inventarisasi ulang seluruh aset Dinas PUTR (Tanah, Bangunan, Jalan, Jaringan Irigasi, Jembatan, Alat Berat, Kendaraan, dll).
 - b. Melakukan rapat koordinasi lintas OPD untuk sinkronisasi data dan penyelesaian aset.
 - c. Menyusun laporan kondisi aset hasil inventarisasi dan validasi untuk mendukung target kondisi baik 100%.
 - d. Melakukan monitoring dan pelaporan tindak lanjut secara triwulanan.

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Program/Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	42,05%	43,48%	103,40%
		Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga terhadap Air Minum yang Layak	90,92%	90,93%	100,01%
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	93,75%	93,77%	100,02%
	Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	15,00%	15,00%	100,00%
	Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	15,00%	15,00%	100,00%

Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	62,00%	62,00%	100,00%
	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	84,09%	85,74%	101,96%
	Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	28,57%	28,58%	100,04%
	Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	27,00%	27,00%	100,00%
	Rata-Rata Capaian Kinerja				103,45%

Rata-rata capaian kinerja sebesar 103,45%

Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 50% (Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014), dengan demikian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang secara umum dinyatakan berhasil dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **103,45%**.

Salah satu indikator kinerja utama yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) adalah Indeks Kualitas Infrastruktur. Penetapan target IKK berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, sekaligus memastikan keterkaitan langsung antara kebijakan, program, dan kegiatan DPUTR dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029.

Selanjutnya, komponen indikator berupa seluruh nilai indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berjumlah 9 Indikator Kinerja Utama dihitung menggunakan Metode *Weight Composite Index* (WCI). Berikut hasilnya disajikan didalam tabel :

Tabel 3.2
Capaian Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Bandung Tahun 2025

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (IKI PUTR)	45,73%	45,85%	100,26%

B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Nilai AKIP - Nilai IKM	57.571.232.158,56	46.420.646.031,00	80,63%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	527.068.100,00	430.715.400,00	81,72%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	225.000.000,00	199.232.300,00	88,55%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	36.719.000,00	73,44%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000,00	17.495.800,00	43,74%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	40.000.000,00	29.029.200,00	72,57%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	40.000.000,00	29.899.800,00	74,75%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.068.100,00	18.961.000,00	59,13%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.378.300,00	99,38%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	38.256.698.450,00	32.947.064.202,00	86,12%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38.093.467.950,00	32.842.087.202,00	86,21%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	59.778.000,00	35.983.000,00	60,19%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.260.000,00	46.904.000,00	76,57%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	42.192.500,00	22.090.000,00	52,36%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Ketentuan	515.517.800,00	354.773.880,00	68,82%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	11.516.000,00	23,03%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	283.700.000,00	244.516.380,00	86,19%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	108.817.800,00	68.145.000,00	62,62%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000,00	15.526.500,00	31,05%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.000.000,00	15.070.000,00	65,52%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	1.256.625.000,00	1.183.756.025,00	94,20%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	496.625.000,00	489.790.275,00	98,62%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	22.841.000,00	91,36%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000,00	23.270.000,00	93,08%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	330.000.000,00	276.196.500,00	83,70%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	43.570.000,00	87,14%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	330.000.000,00	328.088.250,00	99,42%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	2.885.232.700,00	2.609.688.273,00	90,45%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.000.000,00	24.564.300,00	98,26%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.428.135.000,00	1.384.746.583,00	96,96%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45.000.000,00	44.486.500,00	98,86%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41.100.500,00	40.301.650,00	98,06%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150.000.000,00	145.987.200,00	97,32%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.800.000,00	5.850.000,00	75,00%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	768.511.200,00	731.083.200,00	95,13%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.750.000,00	10.250.000,00	21,03%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.936.000,00	222.418.840,00	59,96%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.375.757.530,56	251.602.260,00	10,59%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	39.252.063,91	0	0,00%
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.926.595.366,65	0	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	301.344.800,00	144.332.300,00	47,90%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	108.565.300,00	107.269.960,00	98,81%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.853.282.544,00	7.224.461.985,00	81,60%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.484.638.244,00	714.858.185,00	48,15%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55.000.000,00	0	0,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.288.644.300,00	6.485.603.800,00	88,98%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset BMD dalam Kondisi Baik	1.592.288.100,00	953.743.378,00	59,90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	110.250.000,00	82.817.612,00	75,12%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	470.920.000,00	62.597.609,00	13,29%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	541.535.100,00	541.012.890,00	99,90%
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	52.760.000,00	0	0,00%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	121.823.000,00	34.169.750,00	28,05%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	295.000.000,00	233.145.517,00	79,03%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	1.308.761.934,00	464.840.628,00	35,52%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.308.761.934,00	464.840.628,00	35,52%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir	34.621.232.150,00	33.818.984.181,00	97,68%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	A. Persentase Kesesuaian Panjang Tembok Penahan Tebing Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Tembok Penahan Tebing yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Sesuai Rencana D. Persentase Volume Sungai Kewenangan Kabupaten yang Ditanggulangi E. Persentase Masyarakat SDA yang Meningkatkan Kapasitasnya	25.707.344.660,00	25.495.711.479,00	99,18%
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	303.343.800,00	299.423.800,00	98,71%
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	100.000.000,00	99.484.000,00	99,48%
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	74.980.000,00	74.904.700,00	99,90%
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	16.347.393.600,00	16.306.621.326,00	99,75%
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.233.843.800,00	1.228.344.225,00	99,55%
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	1.447.200.060,00	1.440.449.326,00	99,53%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	638.666.000,00	582.615.800,00	91,22%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	113.970.000,00	112.561.995,00	98,76%
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	300.000.000,00	297.121.658,00	99,04%
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	5.147.947.400,00	5.054.184.649,00	98,18%
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	8.913.887.490,00	8.323.272.702,00	93,37%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	5.354.958.530,00	5.215.826.119,00	97,40%
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	796.686.200,00	790.824.263,00	99,26%
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	982.856.000,00	981.268.500,00	99,84%
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	400.000.000,00	392.749.000,00	98,19%
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1.379.386.760,00	942.604.820,00	68,34%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Akses Layak Terhadap Air Minum di Kawasan Permukiman	35.100.847.798,44	32.849.853.879,00	93,59%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih di Kawasan Perdesaan	35.100.847.798,44	32.849.853.879,00	93,59%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	222.904.225,00	194.317.400,00	87,18%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	399.999.998,44	97.491.300,00	24,37%
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	12.973.627.200,00	12.941.833.482,00	99,75%
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	20.579.998.375,00	18.826.028.152,00	91,48%
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	924.318.000,00	790.183.545,00	85,49%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pembangunan Infrastruktur Persampahan Kawasan Permukiman	6.493.152.000,00	6.351.674.612,00	97,82%
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung	6.493.152.000,00	6.351.674.612,00	97,82%
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun	4.568.500.000,00	4.555.157.182,00	99,71%
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	171.406.000,00	169.566.500,00	98,93%
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Ditingkatkan	1.001.696.000,00	880.062.800,00	87,86%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun	751.550.000,00	746.888.130,00	99,38%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi di Kawasan Permukiman	28.822.762.691,20	25.031.672.109,00	86,85%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata KK yang Memiliki Akses Sanitasi Per Kecamatan	28.822.762.691,20	25.031.672.109,00	86,85%
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	15.921.628.791,20	12.266.924.250,00	77,05%
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	457.226.000,00	456.858.700,00	99,92%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	118.400.000,00	94.630.000,00	79,92%
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10.375.485.900,00	10.320.024.300,00	99,47%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	1.950.022.000,00	1.893.234.859,00	97,09%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	40.366.741.402,00	39.934.133.950,00	98,93%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terbangun - Persentase Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan yang Terpelihara	40.366.741.402,00	39.934.133.950,00	98,93%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3.609.220.000,00	3.598.684.650,00	99,71%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1.300.000.000,00	1.217.646.000,00	93,67%
Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun <i>Outline Plan</i> nya	150.000.000,00	149.370.500,00	99,58%
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	9.217.178.000,00	9.138.428.850,00	99,15%
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	22.589.775.587,00	22.378.831.150,00	99,07%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2.652.000.000,00	2.636.006.080,00	99,40%
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	848.567.815,00	815.166.720,00	96,06%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas	113.110.948.000,00	102.862.777.018,00	90,94%
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	- Persentase Bangunan Gedung yang Terbangun - Persentase Rekomendasi IMB yang Diterbitkan	113.110.948.000,00	102.862.777.018,00	90,94%
Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	0	0,00%
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	112.710.948.000,00	102.862.777.018,00	91,26%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	300.000.000,00	0	0,00%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Standar Kualitas	523.423.021,00	298.479.000,00	57,02%
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Standar Kualitas	523.423.021,00	298.479.000,00	57,02%
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	223.423.021,00	0	0,00%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	298.479.000,00	99,49%
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kabupaten Mantap	274.833.315.729,80	260.858.467.972,00	94,92%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	A. Persentase Kesesuaian Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana B. Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara C. Persentase Kesesuaian Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung Sesuai Rencana D. Persentase Jumlah Jembatan Kewenangan Kab. Bandung yang Terpelihara	274.833.315.729,80	260.858.467.972,00	94,92%
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	260.686.553,22	0	0,00%
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4.102.446.000,00	2.826.307.245,00	68,89%
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	6.400.088.000,00	6.364.317.099,00	99,44%
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	67.554.316.168,00	60.424.201.073,00	89,45%
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Direkonstruksi	63.206.772.471,91	61.019.577.120,00	96,54%
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.000.000.000,00	996.496.420,00	99,65%
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	0	0	0,00%
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2.350.000.000,00	2.343.548.366,00	99,73%
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6.000.000.000,00	5.793.207.607,00	96,55%
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	4.463.538.000,00	4.313.295.898,00	96,63%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	11.450.000.000,00	11.240.010.466,00	98,17%
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1.050.000.000,00	597.285.450,00	56,88%
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	75.795.468.536,67	74.422.921.671,00	98,19%
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	31.200.000.000,00	30.517.299.557,00	97,81%
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi pada Tahun Rencana	1.317.482.000,00	1.307.153.955,00	99,22%
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang Tersertifikasi	1.217.482.000,00	1.213.203.555,00	99,65%
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.217.482.000,00	1.213.203.555,00	99,65%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan/Dokumen Jasa Konstruksi	100.000.000,00	93.950.400,00	93,95%
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	100.000.000,00	93.950.400,00	93,95%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan Tepat Waktu	4.132.071.900,00	3.716.722.470,00	89,95%
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan	947.526.100,00	748.778.498,00	79,02%
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	697.580.000,00	523.533.498,00	75,05%
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	141.400.000,00	94,27%
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	99.946.100,00	83.845.000,00	83,89%



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Pagu Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	2.617.070.800,00	2.437.421.344,00	93,14%
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2.600.243.000,00	2.432.276.344,00	93,54%
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	16.827.800,00	5.145.000,00	30,57%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatannya	475.025.000,00	439.834.484,00	92,59%
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	375.025.000,00	340.315.000,00	90,74%
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	100.000.000,00	99.519.484,00	99,52%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau	92.450.000,00	90.688.144,00	98,09%
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	92.450.000,00	90.688.144,00	98,09%
Jumlah		596.893.208.851,00	553.450.565.177,00	
Rata-Rata Capaian Anggaran (%)				92,72%

Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025 sebesar **Rp. 596.893.208.851,00**. dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 553.450.565.177,00**. atau dengan kata lain capaian realisasi penggunaan anggaran sebesar **92,72%**.

Bila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja dan penggunaan anggaran, maka didapat gambaran sebagai berikut :

Realisasi Kinerja		Realisasi Anggaran
103,45%	:	92,72%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Sepanjang Tahun 2025 ini, beberapa keberhasilan dan ketidakberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung. Keberhasilan yang telah dicapai meliputi keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan tepat pada waktunya. Namun terdapat juga beberapa ketidakberhasilan yang masih terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung.

Faktor utama keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2025 dikarenakan adanya kerja sama dan dukungan dari semua pihak yang saling berkesinambungan sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 adalah :

1. Belum efektifnya koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja,
2. Belum optimalnya kualitas maupun kuantitas sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan bidang terutama SDM Teknis,
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas kinerja.

Solusi permasalahan di atas, yaitu :

1. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kinerja yang memadai agar capaian kinerja lebih optimal,
2. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap bidang dengan Instrumen Dokumen IKU berupa laporan triwulan serta optimalnya koordinasi antar Bidang dan *Stakeholder* terkait,
3. Melakukan diklat teknis secara berkala untuk pegawai yang belum mempunyai kemampuan teknis.

Melalui pengukuran kinerja ini, keberhasilan pencapaian kinerja perangkat daerah dapat diukur seberapa efisien dan efektifnya dalam mengelola sumber daya. Keberhasilan dan kegagalan seluruh kegiatan harus dapat diukur dan pengukuran tersebut ditekankan pada keluaran, manfaat dan dampak dari program bagi kesejahteraan masyarakat.

4.2. Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 ada beberapa kondisi yang diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi perhatian utama sebagai acuan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang pada Tahun 2026, yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aktivitas kinerja termasuk sarana pendukungnya untuk memaksimalkan kinerja organisasi.
- Diharapkan pada Tahun 2026 tidak ada refocusing anggaran bagi Program/Kegiatan Strategis Kabupaten serta Program/Kegiatan pengampu pelayanan dasar (SPM).
- Menegakkan komitmen atas kompetensi SDM internal berdasarkan kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai upaya meningkatkan kinerja dinas yang berpotensi hasil dan berkomitmen terhadap prosedur standar.
- Mendorong pemangku kebijakan agar dapat menghasilkan anggaran kegiatan secara profesional guna menjamin terselenggaranya program dan kegiatan yang dapat mencapai sasaran baik dari segi waktu pelaksanaan maupun keluaran yang dihasilkan dengan fokus utama pada asas manfaat terhadap kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL. RAYA SOREANG-BANJARAN KM.3 TELP.(022) 5892580 Kode Pos 40911

Website : www.bandungkab.go.id Email : dputr@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/Kep-3840/DPUTR/2025.
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Bandung Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN /11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Tujuan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG,



Dr. Ir. H. ZEIS ZULTADAWA.MM. IPU. ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700308 199703 1 005

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;
3. Inspektur Kabupaten Bandung.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 Nomor : 800/Kep-3840/DPUTR/2025.
 Tanggal : 1 Oktober 2025
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

1. Nama Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Tugas : Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	IKU	ALASAN/SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Menggunakan <i>Weighted Composite Index</i> (WCI) dalam menghitung indikator. Komponen indikator berupa seluruh nilai indikator sasaran DPUTR

Soreang, 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KABUPATEN BANDUNG



Dr. Ir. H. ZEIS ZULTAOAWA, MM., IPU, ASEAN Eng.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700308 199703 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU, ASEAN Eng
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Jabatan : BUPATI BANDUNG
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 17 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



4536/a51d5

DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU, ASEAN Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 197003081997031005

Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui aplikasi STAKANG <https://siakang.bandungkab.go.id> dan dapat dicek melalui QRCode dihalaman ini.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Kualitas E-Government Melalui Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur, Tata Kelola Pemerintahan, dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai AKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 82.00 Poin
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai AKIP • Nilai IKM 	<ul style="list-style-type: none"> • 82.00 Poin • 91.00 %
II.	Meningkatkan Kualitas dan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengurangan Luas Banjir Kawasan Perkotaan (Definisi Luas Daerah / Lokasi Terdampak Banjir adalah Daerah Dengan Lama Genangan Lebih dari 24 Jam) 	<ul style="list-style-type: none"> • 46.14 %
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir • Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik 	<ul style="list-style-type: none"> • 46.14 % • 67.45 %
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik 	<ul style="list-style-type: none"> • 49.00 %
III.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Akses Layak Terhadap Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 94.72 %
3	Meningkatnya Akses Layak Terhadap Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 94.72 %
IV.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Rumah, Perumahan dan Permukiman dengan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Akses Layak Terhadap Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • 93.50 %
2	Meningkatnya Akses Layak Terhadap Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • 93.50 %
V.	Terwujudnya Bangunan Pemerintah yang Representatif	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pembangunan Bangunan Pemerintah Sesuai Ketentuan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • 80.00 %
5	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • 80.00 %
VI.	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Aman dan Nyaman	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kemantapan Jalan dan Kelengkapannya 	<ul style="list-style-type: none"> • 76.00 %
6	Meningkatnya Kualitas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap 	<ul style="list-style-type: none"> • 76.00 %
VII.	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Tenaga Terampil Bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> • 82.14 %
7	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil dan Tersertifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 82.14 %
VIII.	Meningkatkan Keserasian Arah Pembangunan dengan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan Rencana Tata Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • 95.83 %
8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • 95.83 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.677.122.197,00	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	44.884.473.141,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	33.832.037.546,66	APBD
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.105.478.000,00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20.641.740.856,20	APBD
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	56.430.328.744,00	APBD
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	135.843.348.000,00	APBD
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	947.600.000,00	APBD
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	249.830.258.026,58	APBD
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.387.894.000,00	APBD
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.339.457.100,00	APBD
TOTAL		613.919.737.611,44	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

BUPATI BANDUNG,



Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



4536/a51d5

Soreang, 17 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,



DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU, ASEAN Eng

Pembina Utama Muda
NIP. 197003081997031005

Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui aplikasi SIKANG <https://siakang.bandungkab.go.id> dan dapat dicek melalui QRCode dihalaman ini.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA. MM., IPU. ASEAN Eng.
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Jabatan : BUPATI BANDUNG
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 25 September 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si

DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU.ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda
NIP. 197003081997031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • 45,70 Poin
1.	Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kab/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • 42,05%
		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Terhadap Air Minum yang Layak • Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Terhadap Air Minum yang Aman 	<ul style="list-style-type: none"> • 90,92% • 21,26%
2.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak • Persentase Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • 93,75% • 23,02%

		yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	
3.	Tersedianya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Terbangunnya Infrastruktur pada Permukiman Kawasan Strategis 	<ul style="list-style-type: none"> 15,00%
4.	Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> 15,00%
5.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 65,00%
6.	Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Aman Nyaman dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> 84,09%
7.	Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 28,57%
8.	Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> 27,00%

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	57.571.232.158,56	APBD-P
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	33.011.310.150,00	APBD-P
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	35.100.847.798,44	APBD-P
4.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.493.152.000,00	APBD-P
5.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	28.822.762.691,20	APBD-P
6.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	40.366.741.402,00	APBD-P
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	113.110.948.000,00	APBD-P
8.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	700.000.000,00	APBD-P
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	270.613.237.729,80	APBD-P
10.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.317.482.000,00	APBD-P
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.132.071.900,00	APBD-P
Total		591.239.785.830,00	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

Soreang, 25 September 2025

BUPATI BANDUNG,

PIHAK PERTAMA,


Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP., M.Si


DR. IR. H. ZEIS ZULTAQAWA, MM., IPU.ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda
NIP. 197003081997031005

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANDUNG

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi	Persentase Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Bangunan Pengendali Banjir	46,14%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 3. Kapasitas air baku	Persen	46,14%		
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persen	100,00%		
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	Triwulan I :	5	
							Triwulan II :	6	
							Triwulan III :	8	
							Triwulan IV :	12	
			Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	Triwulan I :	18,11	
							Triwulan II :	24,15	
							Triwulan III :	30,19	
							Triwulan IV :	48,30	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Km	Triwulan I :	0,05	
							Triwulan II :	0,07	
							Triwulan III :	0,09	
							Triwulan IV :	0,14	
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Km	Triwulan I :	0,092	
							Triwulan II :	0,122	
							Triwulan III :	0,153	
							Triwulan IV :	0,244	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	2	
							Triwulan IV :	3	
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Km	Triwulan I :	0,66	
							Triwulan II :	0,87	
							Triwulan III :	1,09	
							Triwulan IV :	1,75	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi	Persentase Saluran Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik	67,45%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persen	46,14%		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan/atau Dimodernisasi 2. Luas Layanan Irigasi Multikomoditas yang Dibangun dan/atau Ditingkatkan Padi dan Non Padi	Persen	100,00%		
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	Triwulan I :	2,28	
		Triwulan II :					3,04		
		Triwulan III :					3,80		
		Triwulan IV :					6,08		
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	Triwulan I :	2	
		Triwulan II :					3		
		Triwulan III :					4		
		Triwulan IV :					6		
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Triwulan I :	2,22	
		Triwulan II :					2,96		
		Triwulan III :					3,70		
		Triwulan IV :					5,92		
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :					1		
		Triwulan III :					1		
		Triwulan IV :					1		
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	2	
		Triwulan II :					3		
		Triwulan III :					4		
		Triwulan IV :					6		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Meningkatnya Akses Layak Terhadap Air Bersih	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Air Bersih	93,50%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%) 2 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (%)	Persen	93,50%		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten 2. Tersusun dan Ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Persen	100,00%		
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	Triwulan I :	30	
		Triwulan II :					40		
		Triwulan III :					50		
		Triwulan IV :					80		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :					1		
		Triwulan III :					1		
		Triwulan IV :							
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Liter/Detik	Triwulan I :	0,0	
		Triwulan II :					0,0		
		Triwulan III :					0,1		
		Triwulan IV :					0,1		
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Liter/Detik	Triwulan I :	2,61	
		Triwulan II :					3,49		
		Triwulan III :					4,36		
		Triwulan IV :					6,97		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	Triwulan I :	84	
							Triwulan II :	112	
							Triwulan III :	141	
							Triwulan IV :	225	
Meningkatnya Akses Layak Terhadap Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Layak Terhadap Sanitasi	94,72%	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Kapasitas Sampah yang Dikelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persen	80,00%		
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Persampahan (TPST/TPS3R/TPS) yang Terbangun di Wilayah Kewenangan Kabupaten	Persen	100,00%		
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Dibangun	Ton/Hari	Triwulan I :	20	
							Triwulan II :	20	
							Triwulan III :	20	
							Triwulan IV :	20	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	Triwulan I :	23	
							Triwulan II :	30	
							Triwulan III :	38	
							Triwulan IV :	60	
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Ditingkatkan	Ton/Hari	Triwulan I :	5	
							Triwulan II :	7	
							Triwulan III :	8	
							Triwulan IV :	13	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	2	
							Triwulan IV :	2	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Akses Aman Terhadap Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi	94,72%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi layak 2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	94,72%		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	100,00%		
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun	M3/Hari	Triwulan I :	0,67	
		Triwulan II :					0,89		
		Triwulan III :					1,11		
		Triwulan IV :					1,78		
			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M3/Hari	Triwulan I :	3	
		Triwulan II :					3		
		Triwulan III :					3		
		Triwulan IV :					3		
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :					1		
		Triwulan III :					1		
		Triwulan IV :					1		
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	Triwulan I :	141	
		Triwulan II :					188		
		Triwulan III :					235		
		Triwulan IV :					376		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	5	
		Triwulan II :					5		
		Triwulan III :					5		
		Triwulan IV :					5		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	49,00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	49,00%		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saluran Drainase Perkotaan yang Terbangun dan Terpelihara	Persen	100,00%		
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Meter	Triwulan I :	840	
		Triwulan II :					1120		
		Triwulan III :					1400		
		Triwulan IV :					2240		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	2	
		Triwulan II :					3		
		Triwulan III :					3		
		Triwulan IV :					5		
			Penyusunan <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Tersusunnya <i>Outline Plan</i> pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun <i>Outline Plan</i> nya	Kawasan Genangan	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :					1		
		Triwulan III :							
		Triwulan IV :							
			Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	Triwulan I :	4	
		Triwulan II :					6		
		Triwulan III :					7		
		Triwulan IV :					11		
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	Triwulan I :	75	
		Triwulan II :					100		
		Triwulan III :					125		
		Triwulan IV :					199		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	3	
		Triwulan II :					4		
		Triwulan III :					5		
		Triwulan IV :					8		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	4	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas	80,00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Program Penataan Bangunan Gedung	1. Rasio kepatuhan IMB Kab/ Kota 2. Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	80,00%		
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting 2. Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten yang Dipelihara/ Dirawat	Persen	100,00%		
			Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan I :	5	
							Triwulan II :	6	
							Triwulan III :	8	
							Triwulan IV :	12	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKPG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan Pemerintah yang Sesuai Standar Kualitas	80,00%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung	Persen	80,00%		
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung	Persen	100,00%		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :		
			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :		
Meningkatnya Kualitas Jalan	Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	76,00%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	76,00%		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1. Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang Jalan yang Dibangun 3. Panjang Jembatan yang Dibangun 4. Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur/Fungsi) 5. Panjang Jembatan yang Diganti/Dilebarkan 6. Panjang Jalan yang Direkonstruksi/Direhabilitasi 7. Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 8. Panjang Jalan yang Dipelihara 9. Panjang Jembatan yang Dipelihara Terpelihara	Persen	100,00%		
			Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	2	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	Triwulan I :	6	
							Triwulan II :	7	
							Triwulan III :	9	
							Triwulan IV :	15	
			Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	Km	Triwulan I :	9	
							Triwulan II :	12	
							Triwulan III :	15	
							Triwulan IV :	23	
			Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	Triwulan I :	0,6	
							Triwulan II :	0,8	
							Triwulan III :	1,0	
							Triwulan IV :	1,6	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	Triwulan I :	3	
							Triwulan II :	4	
							Triwulan III :	6	
							Triwulan IV :	9	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	Triwulan I :	0,041	
							Triwulan II :	0,055	
							Triwulan III :	0,069	
							Triwulan IV :	0,110	
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Km	Triwulan I :		
							Triwulan II :		
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Km	Triwulan I :	0,5	
							Triwulan II :	0,6	
							Triwulan III :	0,8	
							Triwulan IV :	1,2	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	Triwulan I :	20	
							Triwulan II :	20	
							Triwulan III :	20	
							Triwulan IV :	20	
			Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	Triwulan I :	4	
							Triwulan II :	5	
							Triwulan III :	7	
							Triwulan IV :	11	
			Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	2	
							Triwulan IV :	2	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	Triwulan I :	17	
							Triwulan II :	22	
							Triwulan III :	28	
							Triwulan IV :	44	
			Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitas	Km	Triwulan I :	3,94	
							Triwulan II :	5,26	
							Triwulan III :	6,57	
							Triwulan IV :	10,52	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	Triwulan I :	5,3	
							Triwulan II :	7,0	
							Triwulan III :	8,80	
							Triwulan IV :	14,08	
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi	Persentase SDM Bidang Konstruksi Terampil yang Tersertifikasi	82,14%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Dilatih Memiliki Sertifikat Kompetensi	Persen	82,14%		
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih dan Bersertifikat	Persen	100,00%		
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	Triwulan I :	50	
							Triwulan II :	50	
							Triwulan III :	50	
							Triwulan IV :	50	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Daerah yang Dikelola	Persen	100,00%		
			Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang Ditetapkan	95,83%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penataan Ruang yang Ditetapkan 2. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	Persen	95,83%		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) yang Ditetapkan	Persen	100,00%		
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Dokumen Administrasi dan Penyempurnaan Dokumen Hasil Evaluasi dan Masukan pada Forum Lintas Sektor dalam rangka Penerbitan Persetujuan Substansi	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Orang	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) yang Disusun	Persen	100,00%		
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Kegiatan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Arah Kebijakan Rencana Tata Ruang	Persen	100,00%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00%		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	- Nilai AKIP - Nilai IKM	A (82,00 91,00%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Poin Persen	A (82,00) 91,00%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	100,00%		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Triwulan I :		
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Persen	100.00%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Triwulan I :	351	
		Triwulan II :					468		
		Triwulan III :					585		
		Triwulan IV :					936		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :							
		Triwulan III :							
		Triwulan IV :							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Triwulan I :	3	
		Triwulan II :					3		
		Triwulan III :					3		
		Triwulan IV :					3		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :							
		Triwulan III :							
		Triwulan IV :							
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai BMD	Persen	100,00%		
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
		Triwulan II :							
		Triwulan III :							
		Triwulan IV :							

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Persen	100,00%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Triwulan I :	23	
							Triwulan II :	30	
							Triwulan III :	38	
							Triwulan IV :	60	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Triwulan I :	13	
							Triwulan II :	17	
							Triwulan III :	21	
							Triwulan IV :	34	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Triwulan I :	9	
							Triwulan II :	12	
							Triwulan III :	16	
							Triwulan IV :	25	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persen	100,00%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	3	
							Triwulan II :	4	
							Triwulan III :	6	
							Triwulan IV :	9	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :		
							Triwulan III :		
							Triwulan IV :		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	4	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Triwulan I :	3	
							Triwulan II :	3	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	3	
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	4	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	4	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	4	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET										
1	2	3	4	5	6	7	8		9			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00%					
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Triwulan I :	1				
		Triwulan II :					1					
		Triwulan III :										
		Triwulan IV :										
			Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Triwulan I :	1				
		Triwulan II :					1					
		Triwulan III :					1					
		Triwulan IV :										
			Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Triwulan I :	1				
		Triwulan II :					1					
		Triwulan III :					1					
		Triwulan IV :					1					
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Triwulan I :	1				
		Triwulan II :					1					
		Triwulan III :					1					
		Triwulan IV :										
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Triwulan I :	1	
										Triwulan II :	1	
										Triwulan III :		
			Triwulan IV :									
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Triwulan I :	3				
		Triwulan II :					3					
		Triwulan III :					3					
		Triwulan IV :					3					

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Triwulan I :	3	
							Triwulan II :	3	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	3	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen	100,00%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Triwulan I :	2	
							Triwulan II :	2	
							Triwulan III :	2	
							Triwulan IV :	2	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Triwulan I :	9	
							Triwulan II :	12	
							Triwulan III :	15	
							Triwulan IV :	24	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Triwulan I :	9	
							Triwulan II :	12	
							Triwulan III :	15	
							Triwulan IV :	24	
			Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :	1	

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Triwulan I :	3	
							Triwulan II :	3	
							Triwulan III :	3	
							Triwulan IV :	3	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Triwulan I :	1	
							Triwulan II :	1	
							Triwulan III :	1	
							Triwulan IV :		
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	Persen	100,00%		
							Triwulan I :	4	
							Triwulan II :	5	
							Triwulan III :	6	
							Triwulan IV :	10	

Soreang, 25 September 2025





**CASCADING KINERJA (Horizontal)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG TAHUN 2026**

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Ketersediaan Akses dan Layanan Infrastruktur Dasar yang Terintegrasi, Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	• Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (IKI PUTR)	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Erisien	• Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah • Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	• Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah • Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	• Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Nilai AKIP	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
													• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	• Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
													• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	• Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
													• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	• Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
													• Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	• Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
													• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
													• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
													• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	• Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
													• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	• Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
													• Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	• Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
									• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	• Nilai BMD	• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	• Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
													• Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	• Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
													• Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	• Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
													• Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	• Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Barang Milik Daerah pada SKPD		Milik Daerah pada SKPD	Barang Milik Daerah pada SKPD
													• Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	• Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
									• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya Kepegawaian Perangkat Daerah	• Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	• Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	• Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
													• Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	• Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
													• Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	• Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
													• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	• Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
													• Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
													• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	• Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
									• Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
													• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
													• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
													• Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
													• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
													• Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Bahan/Material	• Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
													• Fasilitas Kunjungan Tamu		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	• Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
													• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
									• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Pengadaan Mebel		Tersedianya Mebel	• Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
													• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	• Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
									• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
													• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
													• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
													• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
									• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang	• Persentase BMD dalam Kondisi Baik	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	• Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Urusan Pemerintahan Daerah		Urusan Pemerintahan Daerah		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
													• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	• Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
													• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	• Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
													• Pemeliharaan Mebel		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	• Jumlah Mebel yang Dipelihara
													• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
													• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
									• Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tepat Waktu	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
			Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	• Rasio Luas Kawasan Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota • Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga Terhadap Air Minum yang Layak	• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir, Akses Terhadap Irigasi, dan Kapasitas Air Baku	• Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir • Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas • Kapasitas Air Baku	• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WWS dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air Melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air pada Wilayah Sungai di Kewenangan Kabupaten	• Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Melalui Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air di Wilayah Kewenangan Kabupaten	• Operasi dan Pemeliharaan Sungai		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	• Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara
													• Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	• Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan
													• Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	• Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara
													• Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir		Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	• Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara
													• Normalisasi/Restorasi Sungai		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	• Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi
													• Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	• Jumlah Dokumen Rencana Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun
													• Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		Terbanggunanya Embung dan Penampung Air Lainnya	• Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun
													• Rehabilitasi Tanggul Sungai		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	• Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi
									• Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah Ha dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Kondisi Baik Sesuai Kewenangan	• Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan/atau Dimodernisasi	• Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	• Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi
													• Rehabilitasi Bendung Irigasi		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	• Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan • Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota		Terbangunnya Jaringan Perpipaan Air Minum Baru	Penetapan Dokumen RISPAM Kabupaten • Terusun dan Ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	• Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Tersusunnya Dokumen Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	• Jumlah Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun
													• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	• Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun
													• Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	• Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan
													• Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	• Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun
													• Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Mendapatkan Perluasan	• Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	• Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	• PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	• Persentase Kapasitas Sampah yang Dikelola di TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	• Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Infrastruktur Persampahan sesuai Kewenangan Kabupaten	• Jumlah Infrastruktur Persampahan (TPST/TPS3R/TPS) yang Terbangun di Wilayah Kewenangan Kabupaten	• Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	• Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Dibangun
													• Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	• Kapasitas TPA/TPST/TPS-3R/TPS yang Ditingkatkan
													• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	• Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun
					• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak • Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	• Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	• Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	• Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Dibangun
													• Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	• Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara
													• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun	• Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Disusun
					• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	• Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	• Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	• Jumlah Saluran Drainase Perkotaan yang Terbangun dan Terpelihara	• Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	• Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													• Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	• Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan
													• Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan		Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	• Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plan nya
													• Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	• Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi
													• Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	• Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun
													• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	• Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun
			Tersedianya Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	• Persentase Bangunan Gedung Strategis di Wilayah Kewenangan Kabupaten	• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	• Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota • Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	• Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota • Persentase Bangunan Gedung IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota • Jumlah IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	• Jumlah IMB yang Diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting • Jumlah Bangunan Gedung Negara Milik Pemerintah Kabupaten yang Dipelihara/Dirawat	• Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	• Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
													• Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	• Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
													• Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	• Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	• Persentase Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan Penataan Bangunan dan Lingkungannya Lintas Daerah	• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	• Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab. Bandung	• Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	• Jumlah IMB yang Diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting • Jumlah Bangunan dan Lingkungan Pemerintah yang Dibangun dan Ditata	• Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan	• Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	• Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Jalan	• Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	• Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Jembatan sesuai Kewenangan Kabupaten	• Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota • Panjang Jalan yang Dibangun • Panjang Jembatan yang Dibangun • Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur/Fungsi) • Panjang Jembatan yang Diganti/Dilebarkan • Panjang Jalan yang Direkonstruksi/Direhabilitasi • Panjang Jembatan yang Direhabilitasi • Panjang Jalan yang Dipelihara	• Pengelolaan Leger Jalan		Terkelolanya Leger Jalan	• Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												• Panjang Jembatan yang Dipelihara				
												• Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	• Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun
												• Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dan Desa	• Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya
												• Pembangunan Jalan			Terbangunnya Jalan	• Panjang Jalan yang Dibangun
												• Rekonstruksi Jalan			Terekonstruksinya Jalan	• Panjang Jalan yang Direkonstruksi
												• Pemeliharaan Berkala Jalan			Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	• Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala
												• Pelebaran Jalan Menuju Standar			Jalan yang Mendapatkan Pelebaran Menuju Standar	• Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar
												• Pemeliharaan Rutin Jembatan			Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	• Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin
												• Rehabilitasi Jembatan			Terehabilitasinya Jembatan	• Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi
												• Pembangunan Jembatan			Terbangunnya Jembatan	• Panjang Jembatan yang Dibangun
												• Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Jalan/Jembatan yang Mendapatkan Survey Kondisi	• Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya
												• Rehabilitasi Jalan			Terehabilitasinya Jalan	• Panjang Jalan yang Direhabilitasi
			Terselenggaranya Jasa Konstruksi Daerah	• Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Lingkup Daerah	• PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	• Rasio Tenaga Operator/Teknis/Analis yang Dilatih Memiliki Sertifikat Kompetensi	• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi			Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang Terlatih yang Tersertifikasi	• Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih dan Bersertifikat	• Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Mendapatkan Pelatihan	• Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau Analis yang Dilatih
									• Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	• Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Daerah yang Dikelola	• Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	• Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan
			Terselenggaranya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang	• Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Persentase Dokumen Perencanaan Penataan Ruang yang Ditetapkan • Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			Tersedianya Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) Yang Ditetapkan	• Jumlah Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) yang Ditetapkan	• Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	• Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota
													• Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Tersedianya Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	• Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
													• Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	• Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	
									• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Tersedianya Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) Yang Disusun	• Persentase Ketersediaan Dokumen Kajian Bahan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang • Jumlah Dokumen RTR (RTRW dan RDTR) yang Disusun	• Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya Orthorektifikasi Citra dari Raw Citra ke Format ECW dan Tersedianya Data SHP Peta Dasar	• Jumlah Data SHP Peta Dasar
													• Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman	• Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	
									• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Terselenggaranya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	• Persentase Rencana Tapak yang Diidentifikasi Progres Pemanfaatan Ruangnya • Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Arahan Kebijakan Rencana Tata Ruang	• Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Meningkatkan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan	• Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran Strategis PD	Indikator Sasaran PD	Program	Program			Kegiatan	Kegiatan			Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		
						Pengampu Program	Sasaran	Indikator		Pengampu Kegiatan	Sasaran	Indikator		Pengampu Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													• Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Tersedia dan Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	• Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
									• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	• Persentase Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang yang Terpantau • Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Ditindaklanjuti	• Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	• Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
													• Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal		Terlaksananya Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal	• Jumlah Berita Acara Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal
			Meningkatnya Aksesibilitas Jalan untuk Masyarakat yang Nyaman dan Aman	• Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Jalan	• Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	• Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Terbangunnya dan Terpeliharanya Prasarana Jalan dan Jembatan sesuai Kewenangan Kabupaten	• Panjang Jalan Berdasarkan yang Ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota • Panjang Jalan yang Dibangun • Panjang Jembatan yang Dibangun • Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Struktur/Fungsional) • Panjang Jembatan yang Diganti/Dilebarkan • Panjang Jalan yang Direkonstruksi/Direhabilitasi • Panjang Jembatan yang Direhabilitasi • Panjang Jalan yang Dipelihara • Panjang Jembatan yang Dipelihara	• Pemeliharaan Rutin Jalan		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	• Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Sistem Pengelolaan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	• Persentase Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	• Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Teusat Skala Permukiman		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	• Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang Ditingkatkan

❖ Piagam Penghargaan



Peringkat III Kategori Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



Juara II Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Juara 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Juara 1 Penyelenggaraan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025



Pemenang Lomba Kantor Berbudaya Lingkungan (Eco-Office) Lingkup Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2025

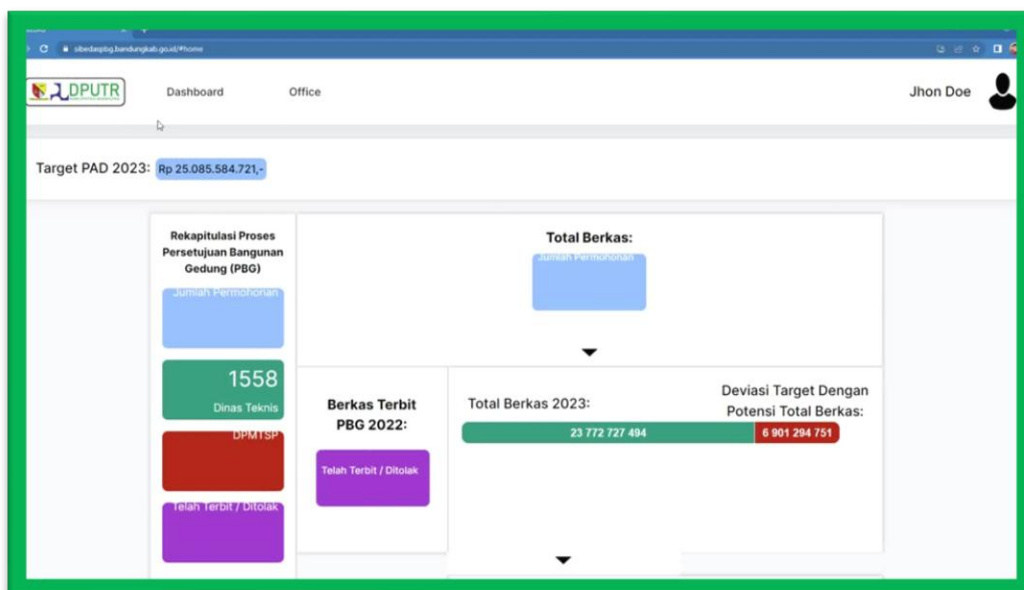
➤ SIBEDAS PBG

SIBEDAS PBG adalah suatu alur percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang memuat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahap input, dimana pada tahap ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan *Push Strategy* yang berkolaborasi dengan Perantara dan Tim Wasdal sebagai tenaga fasilitator apabila ada pemohon yang memerlukan bantuan teknis maupun non teknis.

Tahapan yang kedua adalah proses evaluasi kelengkapan data dari pemohon. Pada tahap ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan *Pull Strategy* dengan cara pendampingan terhadap pemohon yang belum melengkapi persyaratan teknis. Untuk pemohon yang sudah melengkapi persyaratan teknis akan melalui proses verifikasi, dimana proses ini berlandaskan BIFO (*Big In, First Out*). Tahapan yang ketiga adalah terbitnya Rekomendasi Teknis PBG, setelah itu dibuatlah *Dashboard* untuk memonitoring berkas permohonan tersebut.

Manfaat dari inovasi ini untuk memonitoring setiap berkas PBG berdasarkan status permohonan, seperti belum diverifikasi, perbaikan ulang, verifikasi ulang, dan selesai verifikasi. Untuk mempermudah melihat pemetaan persebaran karena tersajikan dalam bentuk peta. Untuk mempermudah rekap data.

Hasil dari inovasi ini terciptanya suatu aplikasi *Dashboard* untuk memonitoring pencapaian target PAD Bangunan Gedung sedangkan dampak dari inovasi ini adalah mempermudah monitoring, akses masuk Sibedas PBG yang lebih mudah, tidak membuat dashboard manual dan lebih mudah dimengerti.



Tampilan Dashboard Aplikasi Sibedas PBG

➤ **SIJALAK**

Aplikasi SIJALAK (Sistem Informasi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bandung) merupakan sebuah platform digital inovatif yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kondisi kerusakan infrastruktur publik, seperti jalan raya, jembatan, saluran air, dan tembok penahan. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara warga dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Guna memastikan bahwa kerusakan fasilitas umum dapat segera teridentifikasi dan ditangani oleh dinas terkait dengan cepat dan tepat. Dengan adanya SIJALAK diharapkan laporan kerusakan dapat ditindaklanjuti lebih efisien sehingga pemeliharaan infrastruktur dapat dilakukan secara berkelanjutan demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman resmi <https://sijalak-kab-bandung.com> memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas publik di Kabupaten Bandung.

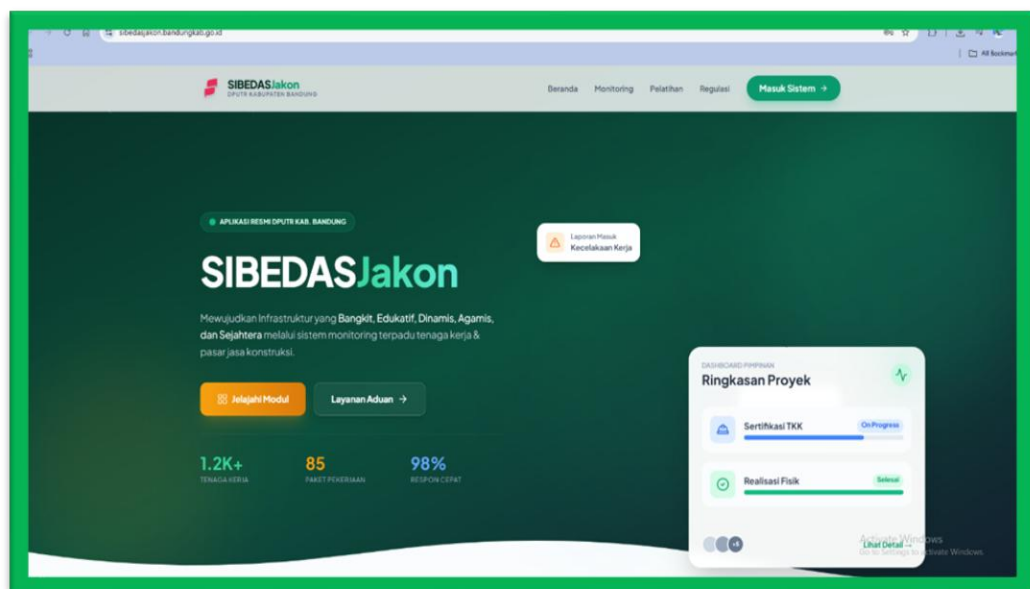


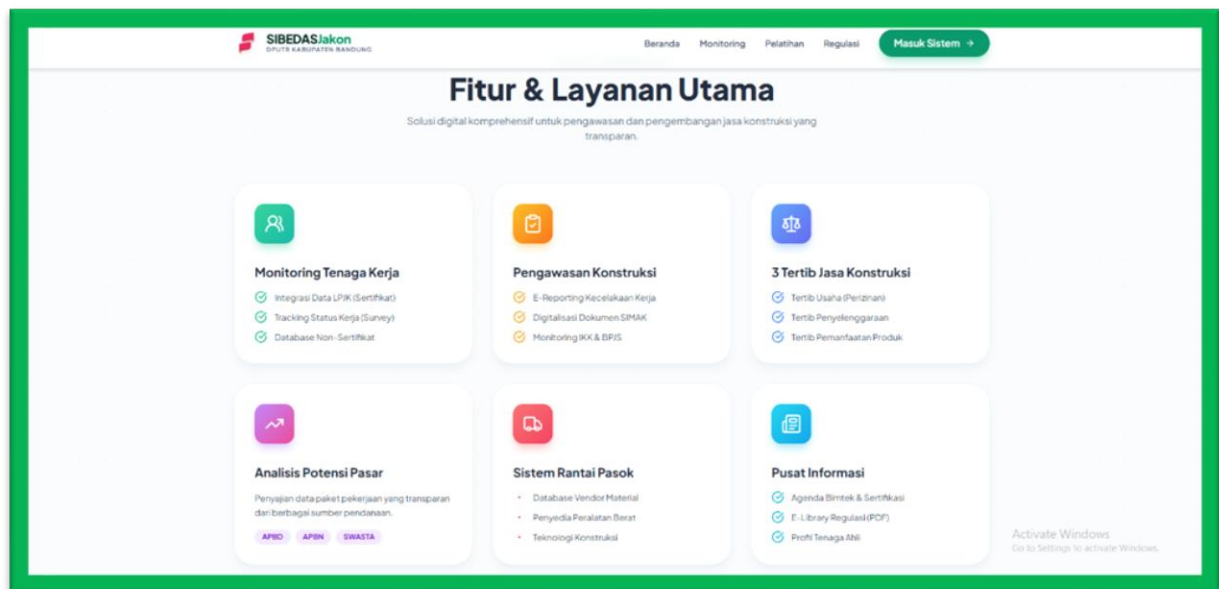
Tampilan Dashboard Aplikasi SI JALAK

➤ SIBEDAS JAKON

Sistem Informasi Pengembangan Jasa Konstruksi (SIBEDAS JAKON) disusun sebagai upaya pemenuhan kewajiban pelaporan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dari Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu dengan adanya aplikasi SIBEDAS JAKON diintegrasikan data terkait rantai pasok, baik sumber daya material, peralatan hingga teknologi, kepemilikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha serta terdapat potensi pasar yang dapat mendorong pelibatan tenaga lokal dalam pembangunan konstruksi di Kabupaten Bandung. Dalam inovasi ini pun dilakukan pendataan mengenai penyelenggaraan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan hingga tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman resmi <https://sibedasjakon.bandungkab.go.id/> memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas publik di Kabupaten Bandung.





Tampilan Dashboard Aplikasi SIBEDAS JAKON

➤ **SIPEDAS (Sistem Pemetaan Drainase)**

Bidang Drainase, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung setiap tahunnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur drainase. Namun, proses monitoring dan pelaporan progres kegiatan masih dilakukan secara manual dan tersebar, menyebabkan :

- Ketidakteraturan dokumentasi dan arsip data pada tiap tahun kegiatan.
- Sulitnya melakukan tracking progres pekerjaan secara real-time.
- Kurangnya konsolidasi database kegiatan drainase.
- Minimnya visualisasi data berbasis peta untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan inovasi SIPEDAS (Sistem Pemetaan Drainase), yaitu sebuah aplikasi monitoring, evaluasi, dan pemetaan digital untuk mendukung tata kelola pembangunan drainase secara transparan, efisien, dan berbasis data.

Aplikasi SIPEDAS dapat diakses melalui link : <https://sites.google.com/view/aplikasi-sipedas-drainase/home?authuser=0>



Tampilan Dashboard Aplikasi SIPEDAS